

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejarah gerakan mahasiswa Indonesia mengenal empat angkatan yang sangat monumental, yaitu: Angkatan 1908, Angkatan 1928, Angkatan 1945 dan Angkatan 1966. Angkatan 1908 disebut sebagai sebagai pelopor kebangkitan nasional, Angkatan 1928 sebagai tonggak sumpah pemuda yang menyatukan seluruh etnisitas dan kedaerahan dalam satu tanah air, satu bahasa, dan satu bangsa. Angkatan 1945 berhasil mengantarkan Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Angkatan 1966 merupakan angkatan yang berhasil menumbangkan rezim Orde Lama. Selain empat angkatan tersebut, terdapat satu angkatan lagi, yaitu Angkatan 1998 yang berhasil menjatuhkan kekuasaan rezim otoriter Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun.

Munculnya gerakan mahasiswa tahun 1998 merupakan bagian dari perjalanan panjang gerakan mahasiswa pada masa Orde Baru, masa rezim otoriter di bawah kepemimpinan Soeharto. Kelahiran Orde Baru, sesungguhnya tidak lepas dari peran gerakan mahasiswa itu sendiri, yang pada waktu itu melalui Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI) menuntut agar Demokrasi Terpimpin dibubarkan dan Soekarno mengundurkan diri. Seperti dicatat dalam sejarah, pada tanggal 10 Januari 1966, ribuan mahasiswa berdemonstrasi di Sekretariat Negara memprotes kenaikan harga dan meminta peraturan ditinjau kembali, yang dikenal dengan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), yaitu: Pembubaran PKI, Rital Kabinet Dwikora dan Turunkan Harga.

Namun dalam perkembangan kemudian, rezim Orde Baru dengan pemerintahan otoriter membuat mahasiswa melakukan protes dan demonstrasi. Pada 1970, para mahasiswa mulai tidak puas terhadap kebijaksanaan dan pejabat pemerintah. Berbagai masalah yang disorot mahasiswa waktu itu adalah Pertamina, Proyek Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang dianggap mirip

proyek Mercusuar, hingga peranan modal asing khususnya Jepang<sup>1</sup>. Puncak protes itu ialah demonstrasi mahasiswa ketika Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka berkunjung ke Indonesia pada tanggal 15 Januari 1974. Demonstrasi itu lalu meletuskan sebuah kerusuhan yang dikenal sebagai peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari).<sup>2</sup>

Setelah peristiwa Malari, hingga tahun 1975 dan 1976, berita tentang aksi protes mahasiswa tidak lagi terdengar ramai. Akan tetapi menjelang, terutama saat-saat antara sebelum dan setelah Pemilu 1977, barulah muncul kembali pergolakan mahasiswa. Gerakan ini mengkritik strategi pembangunan dan kepemimpinan nasional. Demonstrasi yang cukup besar dilakukan mahasiswa pada tahun 1978 menjelang pemilihan kembali Presiden Soeharto pada tanggal 23 Maret 1978.<sup>3</sup>

Setelah gerakan mahasiswa tahun 1978, praktis tidak ada lagi gerakan besar yang dilakukan mahasiswa selama beberapa tahun akibat diberlakukannya konsep Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) oleh pemerintah secara paksa. Kebijakan NKK dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0156/U/1978. Konsep ini mencoba mengarahkan mahasiswa hanya menuju pada jalur kegiatan akademik dan menjauhkan dari aktivitas politik karena dinilai secara nyata dapat membahayakan posisi rezim Orde Baru.<sup>4</sup>

Sebagai alternatif terhadap suasana birokratis dan apolitis wadah intra kampus, di awal-awal tahun 80-an muncul kelompok-kelompok studi yang dianggap mungkin tidak tersentuh kekuasaan represif penguasa. Dalam perkembangannya kemudian, eksistensi kelompok ini mulai digeser oleh kehadiran wadah-wadah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh subur sebagai alternatif gerakan mahasiswa. Beberapa kasus lokal yang disuarakan LSM dan komite aksi mahasiswa antara lain: kasus tanah Waduk

---

<sup>1</sup> Donald Willem, *Indonesia Bangkit*, Jakarta; UI Pers, 1981 hal. 199.

<sup>2</sup> S. Tasrif *et al.*, *Generasi Muda Indonesia Diadili: Membela Perkara Hariman Siregar*. Jakarta, 1974, hal 20.

<sup>3</sup> Lukman Hakim, *Ku Dengar Indonesia Memanggil: Pledoi Di hadapan Pengadilan Mahasiswa*, Jakarta: 1979 hal: 127 – 129.

<sup>4</sup> Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) diberlakukan secara efektif tahun 1978 oleh Mendikbud Daoed Joesoef dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) didirikan di kampus-kampus pada tahun 1979. Kebijakan NKK dilaksanakan berdasarkan SK No.0156/U/1978 sesaat setelah Daoed Joesoef dilantik tahun 1979. Lihat Denny J.A, *Gerakan Mahasiswa dan Politik Kaum Muda era 80-an*, Jakarta: CV. Miswar, 1990, hal. 44-45.

Kedung Ombo, Kacapiring, korupsi di Bapindo, penghapusan perjudian melalui Porkas/TSSB/SDSB.

Jalur perjuangan lain ditempuh oleh para aktivis mahasiswa dengan memakai kendaraan lain untuk menghindari sikap represif pemerintah, yaitu dengan meleburkan diri dan aktif di organisasi kemahasiswaan ekstra universitas, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) atau yang lebih dikenal dengan nama Kelompok Cipayung.<sup>5</sup>

Memasuki awal tahun 1990-an, di bawah Mendikbud Fuad Hasan, kebijakan NKK/BKK dicabut dan sebagai gantinya dikeluarkan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK).<sup>6</sup> Melalui PUOK, pemerintah menegaskan bahwa organisasi kemahasiswaan intra kampus (intra-universiter) yang diakui adalah hanyalah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) yang di dalamnya terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Antara tahun 1994-1998 rezim Orde Baru mengumpulkan banyak lawan dan mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh pendahulunya, Presiden Soekarno, pimpinan rezim Orde Lama. Pembredelan tiga media massa, yaitu: *Tempo*, *Editor* dan *Detik* pada pertengahan tahun 1994 membuat Orde Baru mendapat lawan baru dari kaum jurnalis. Mahasiswa memanfaatkan momentum itu dengan membentuk sejumlah aliansi gerakan pemuda dan mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa menuntut pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).<sup>7</sup>

Kekeliruan lain yang dilakukan rezim Orde Baru ialah usaha meniadakan elit tandingan Presiden Soeharto. Diantaranya adalah berupaya menjegal Megawati Soekarnoputri untuk menjadi Ketua Umum PDI (kini PDI Perjuangan),

<sup>5</sup> Mengenai Kelompok Cipayung, lihat Anders Uhlin, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998, hal 109 dan Ridwan Saidi, *Analisis Keberadaan dan Aktivitas KNPI (1973-1992)*, Jakarta; Yayasan Piranti Ilmu, 1992.

<sup>6</sup> Arbi Sanit, *Pergolakan Melawan Kekuasaan: Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*, Yogyakarta: Insist Press, 1999, hal. 179-180.

<sup>7</sup> Eko Sutoro, *Transisi Demokrasi Indonesia: Runtuhnya Rezim Orde Baru*, Yogyakarta: APMD Press, 2003, hal 203. lihat juga Suharsih dan Ign. Mahendra K, *Bergerak Bersama Rakyat: Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: Resist Book, 2007.

yang justru kemudian memunculkan militansi untuk melawan Soeharto. Peristiwa penyerbuan kantor PDI di Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, yang disebut sebagai peristiwa Sabtu, 27 Juli 1996 atau "Sabtu Kelabu" justru membuat figur Megawati Soekarnoputri menjadi semakin populer dan mendapat simpati dari rakyat yang kecewa, terutama kalangan marjinal "wong cilik". Namun seiring dengan krisis ekonomi yang menimpa Indonesia tahun 1997 dan dipilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden keenam kalinya, gerakan mahasiswa tidak bisa lagi dibendung sehingga terlihat semakin keras. Bahkan maraknya demonstrasi mahasiswa, karena dukungan dari kalangan elit politik yang menentang Soeharto.<sup>8</sup>

Pada masa akhir Pemerintahan Soeharto muncul gerakan mahasiswa di berbagai daerah menentang rezim Soeharto. Di Aceh terbentuk Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR). Di Medan muncul Aliansi Gerakan Reformasi Sumatera Utara (AGRESU). Di Bandung lahir Forum Komunikasi Mahasiswa Bandung (FKMB), Front Indonesia Muda Bandung (FIMB), Front Aksi Mahasiswa Unisba (FAMU), Gerakan Mahasiswa Indonesia Untuk Perubahan (GMIP), Komite Pergerakan Mahasiswa Bandung (KPMB), Front Anti Fasis (FAF), Keluarga Mahasiswa ITB (KM ITB) dan Komite Mahasiswa Unpar (KM Unpar).<sup>9</sup>

Di Jakarta lahir FORKOT atau Forum Komunitas Mahasiswa Se-Jabotabek (Forum Kota), Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Se-Jabotabek (FKSMJ) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Di Yogyakarta ada Solidaritas Mahasiswa Untuk Kedaulatan Rakyat (SMKR), Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP), Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta (FKMY), Persatuan Perjuangan Pemuda Yogyakarta (PPPY), Front Aksi Mahasiswa Peduli Rakyat (FAMPERA) dan Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta (LMMY). Di Surabaya ada Arek Surabaya Pro Reformasi (APR/ASPR). Begitu juga di Malang lahir puluhan kesatuan aksi mahasiswa yang konsisten menentang kebijakan dan keberadaan rezim Soeharto.<sup>10</sup>

Seluruh elemen mahasiswa yang berbeda paham dan aliran dapat bersatu

<sup>8</sup> Wan Abbas, *Unjuk Rasa Mahasiswa, Dulu dan Sekarang*, Lihat *Pikiran Rakyat*, 2 April 1998

<sup>9</sup> Lihat Suharsih dan Ign Mahendra K, *Bergerak Bersama Rakyat: Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: Resist Book, 2007, hal. 102.

<sup>10</sup> Diro Aritonang, *Runtuhnya Rezim Daripada Soeharto: Rekaman Perjuangan Mahasiswa Indonesia 1998*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999, hal. 75-76.

dengan satu tujuan untuk menurunkan Soeharto. Organ gerakan mahasiswa yang mencuat pada saat itu antara lain adalah FORKOT, FKSMJ, HMI MPO dan KAMMI karena memelopori pendudukan gedung MPR/DPR pada tanggal 19 Mei 1998. Setelah itu tanggal 21 Mei, Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari Presiden pada siang harinya di Istana Merdeka dan digantikan oleh wakil Presiden B.J. Habibie. Ribuan mahasiswa yang mendengarkan pernyataan itu menyambut dengan suka cita.

## 1.2. Pokok Masalah

Gerakan mahasiswa tahun 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa tahun 1990-an. Gerakan ini diawali dengan terjadinya krisis moneter di pertengahan tahun 1997. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, daya beli masyarakat pun berkurang. Tuntutan mundurnya Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa dengan agenda reformasi mendapat simpati dan dukungan dari rakyat. Peristiwa Trisakti, kerusuhan tanggal 13-14 Mei 1990 dan bentrokan di sejumlah kampus adalah catatan penting menuju klimaksnya gerakan mahasiswa tahun 1998.

Dengan dukungan penuh kelompok pro-demokrasi yang telah jenuh dengan kediktatoran Orde Baru, gerakan mahasiswa kemudian secara terang-terangan didukung oleh kekuatan rakyat. Pendudukan gedung MPR/DPR yang dimulai tanggal 18 Mei 1998 oleh FORKOT dan disempurnakan oleh kelompok FKSMJ pada tanggal 19 Mei 1998 menunjukkan betapa gerakan mahasiswa bahu-membahu untuk menyelesaikan tuntutan reformasi.

Namun pasca bergulirnya reformasi pada tahun 1998, gerakan mahasiswa dihadapkan pada pluralitas gerakan yang sangat tinggi. Kemunculan sejumlah gerakan mahasiswa yang memiliki garis perjuangan dan agenda yang berbeda tidak hanya menyebabkan terjadinya konflik internal lembaga kemahasiswaan tetapi juga konflik antar organisasi gerakan mahasiswa lainnya. Gerakan mahasiswa mulai terpolarisasi terutama setelah tersusupi oleh berbagai kepentingan-kepentingan elit politik yang masuk melalui berbagai bentuk dukungan, sehingga kemudian muncul perpecahan dalam internal gerakan mahasiswa itu sendiri.

Gerakan mahasiswa pasca 1998 tampak sangat mudah terpecah. Tanda-

**Universitas Indonesia**

tanda perpecahan itu dimulai dengan naiknya B.J. Habibie sebagai Presiden RI ke-3 menggantikan Soeharto yang dianggap sebagai masa transisi. Ketika itu, sebagian mahasiswa meninggalkan gedung MPR/DPR, karena menganggap persoalan besar sudah selesai dengan mundurnya Soeharto. Sementara satu kelompok gerakan mahasiswa dari FORKOT<sup>11</sup>, masih tetap tinggal di gedung MPR/DPR.

Pada tanggal 22 Mei 1998 di Gedung MPR/DPR, bentrokan hampir terjadi antara pendukung B.J. Habibie yang memakai simbol-simbol dan atribut keagamaan, yang dikomandoi oleh Ahmad Sumargono, Toto Asmara dan Fadly Zon<sup>12</sup> dengan mahasiswa yang masih bertahan di gedung MPR/DPR. Mahasiswa menganggap B.J. Habibie masih tetap bagian dari rezim Orde Baru. Sementara pendukung B.J. Habibie menganggap bahwa B.J. Habibie menjadi Presiden sudah sah secara konstitusional dan merupakan representasi dari umat Islam.

Untuk menghindari bentrokan tersebut, sekitar 1.000 pasukan gabungan ABRI yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen Sudi Silalahi. Akhirnya pihak tentara (ABRI) dan mahasiswa mencapai kesepakatan dengan Kepala Dinas Penerangan Kodam Jaya Letkol (Inf) DJ Nachrowi, yakni mahasiswa bersedia keluar gedung asalkan dikawal pasukan marinir mengevakuasi mahasiswa dari gedung MPR/DPR ke Universitas Atmajaya.<sup>13</sup>

Sekalipun B.J. Habibie melakukan terobosan-terobosan, sebagian mahasiswa belum juga puas<sup>14</sup>. Bukti ketidakpuasan ini termanifestasi dalam aksi unjuk rasa ketika berlangsung Sidang Istimewa MPR tanggal 10-13 November 1998 yang mengukuhkan B.J. Habibie sebagai Presiden. Sejumlah kelompok mahasiswa menolak hasil Sidang Istimewa, diantaranya karena mempertahankan

<sup>11</sup> Ribuan Mahasiswa Tinggalkan Gedung MPR/DPR dalam *Kompas*, 23 Mei 1998.

<sup>12</sup> Ribuan Mahasiswa Tinggalkan Gedung MPR/DPR, *Ibid*, *Kompas*.

<sup>13</sup> Ribuan Mahasiswa Tinggalkan Gedung MPR/DPR, *Ibid*, *Kompas*.

<sup>14</sup> Ketika itu, era kepemimpinan Presiden B.J. Habibie sudah memulai kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. B.J. Habibie juga memberikan kebebasan pers, dengan menghapuskan elemen pengajuan SIUPP, yang tidak pernah terjadi pada masa Orde Baru. Sejak itu semua orang bebas mendirikan media massa cetak, karena tidak perlu izin lagi. Bermunculanlah beragam harian, koran, tabloid, dan majalah dengan gaya bahasa. Tetapi, seleksi alam akhirnya bekerja; hanya yang berkualitaslah yang bertahan, dan tetap setia mengunjungi pembacanya, sampai hari ini. B.J. Habibie juga membebaskan sejumlah tahanan politik yang dibui di era pemerintahan Orde Baru. Di antaranya, Sri Bintang Pamungkas, Muchtar Pakpahan, Budiman Sujatmiko, dan kawan-kawannya dari PRD. Ia juga melahirkan liberalisasi Parpol, melaksanakan desentralisasi kekuasaan yang melahirkan otonomi daerah dengan segala kelebihan, dan kekurangannya.

kursi ABRI di DPR, hingga soal meminta pertanggungjawaban Soeharto. Aksi unjuk rasa mahasiswa ini terakumulasi dalam satu gerakan bersama di depan kampus Universitas Atma Jaya, Jakarta, yang berakhir dengan bentrokan antara mahasiswa dengan ABRI yang mengakibatkan beberapa mahasiswa tewas tertembak dalam insiden bentrokan tersebut. Peristiwa ini juga dikenal dengan Tragedi Semanggi 1.

Pada masa Pemerintahan B. J. Habibie, aksi demonstrasi yang melibatkan mahasiswa, dan kalangan muda lainnya, terus marak. Berbarengan dengan itu, muncul kelompok-kelompok kritis dari kalangan tua, terutama sejumlah pensiunan jenderal, dan beberapa bekas menteri di era Orde Baru. Misalnya dari kelompok Barisan Nasional (Barnas) yang hampir setiap hari melontarkan kritikan dan menganggap pemerintahan B.J. Habibie tidak legitimate.

Pada bulan November 1998 para mahasiswa dari Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Se-Jabotabek (FKSMJ), Universitas Siliwangi (Unsil), dan Satuan Tugas Keluarga Mahasiswa ITB (Satgas KM-ITB) berhasil mempertemukan empat tokoh nasional, yaitu Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Megawati Soekarnoputri dan Sri Sultan Hamengkubuwono X di Ciganjur. Hasilnya adalah Deklarasi Ciganjur yang melahirkan 8 butir pernyataan, antara lain: Selamatkan RI dari marabahaya, pelaksanaan Pemilu selambat-lambatnya bulan Mei 1999 dan Sidang Umum tiga bulan sesudahnya, menghapus Dwifungsi ABRI, penghapusan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan penarikan Pam Swakarsa dari Sidang Istimewa MPR<sup>15</sup>.

Meskipun demikian Deklarasi Ciganjur tetap tidak diterima oleh seluruh kelompok gerakan mahasiswa yang ada. FKSMJ, misalnya, tetap kecewa dengan hasil tersebut. Hal itu diakui oleh Sarbini, Aktivistis FKSMJ mengatakan:

“Kami hanya sepakat satu poin, yaitu pembubaran Pam Swakarsa, Sedangkan Dwi Fungsi ABRI, termasuk duduknya ABRI di DPR, dari awal sudah kami tolak. Golkar akan tetap menang jika ABRI tetap di DPR. Karena itu, agenda ke depan FKSMJ adalah akan terus mengontrol penguasa dan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat”<sup>16</sup>

Pengakuan Sarbini tersebut menegaskan terjadinya polarisasi dalam gerakan mahasiswa. Bahkan sebagai akibat dari polarisasi gerakan mahasiswa tersebut,

<sup>15</sup> Lihat *Furkon Digadang Militer, Nikmat Membawa Sengsara* dalam *Tempo*, 23 November 1998.

<sup>16</sup> Lihat *Pro Kontra Habibie* dalam *Tempo*, 24 November 1998.

pada tanggal 22 Mei 1998 di gedung MPR/DPR, hampir terjadi bentrok antara kelompok yang mendukung dan kelompok yang menentang B.J. Habibie sebagai Presiden. Kelompok gerakan mahasiswa yang mendukung B.J. Habibie adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Himpunan Mahasiswa Muslim Islam (HMI). Sedangkan kelompok-kelompok gerakan mahasiswa yang menentang B.J. Habibie antara lain adalah FORKOT dan FKSMJ.

Selain didukung oleh kelompok-kelompok mahasiswa, B.J. Habibie juga didukung oleh elit-elit politik Islam yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), diantaranya Amien Rais<sup>17</sup>, Wakil Ketua Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) yang juga pengurus DPP Partai Bulan Bintang, Ahmad Sumargono, Ketua *Institut Policy Studies* (IPS) Fadly Zon, Eggi Sudjana, Fadel Muhammad dan sejumlah elit politik lainnya.<sup>18</sup> Sedangkan kelompok-kelompok ormas yang mendukung B.J. Habibie, seperti Forum Ummat Islam Penegak Keadilan dan Konstitusi (Furkon)<sup>19</sup> dan Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa)<sup>20</sup>. Sebaliknya, elit politik yang menentang B.J. Habibie adalah

<sup>17</sup> M. Amien Rais, tokoh "oposisi" yang dikenal cukup kritis menyuarakan aspirasi masyarakat luas, menyatakan kebahagiaannya atas pengunduran diri Soeharto dari kursi kepresidenan. Ia juga menyatakan penerimaannya atas dialihkannya kursi kepresidenan tersebut kepada B.J. Habibie, yang masih kontroversial, karena tengah diperdebatkan keabsahannya. Namun Ketua PP Muhammadiyah ini yakin: Habibie tidak akan terus menjabat hingga 2003. lihat *Tempo* Edisi 12/03 - 23/Mei/1998.

<sup>18</sup> Muridan S. Widjojo dkk. *Penakluk Rezim Orde Baru, Gerakan Mahasiswa '98*, Jakarta: Sinar Harapan 1999.

<sup>19</sup> Furkon lahir dari pertemuan "silaturahmi" yang digagas para pemuka Islam, mulai acara yang sifatnya intern, berskala kecil, sampai aksi pamer kekuatan "umat". Ada Apel Akbar Umat Islam 1998 oleh Forum Silaturahmi Ulama-Habib dan Tokoh Masyarakat se-Jabotabek, yang menghimpun puluhan ribu massa, di Stadion Utama Senayan; lalu disusul Kongres Umat Islam Indonesia, yang dihadiri sekitar 1.500 peserta dari 30-an ormas Islam di seluruh Nusantara. Lihat *Tempo* Edisi 06/XXVII 10 November 1998.

<sup>20</sup> Para pendukung SI yang disebut Pam Swakarsa ini sebenarnya adalah pemuda-pemuda, ulama-ulama dan santri-santri dari berbagai pesantren se-Jabotabek dan anggota organisasi massa Islam secara perorangan, Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pemuda Muslimin Indonesia (PMI), Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Pemuda Islam (PI), Gerakan Pemuda Ansor (GPA), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pemuda Muhammadiyah, Angkatan Muda Islam Indonesia (AMII), Pemuda Islam Banten, dan lain lain. Mereka membentuk Komite Pendukung Sidang Istimewa karena amanat Kongres Umat Islam antara lain harus mendukung terlaksananya Sidang Istimewa dan menghadapi gerakan Anti SI dan B.J. Habibie. Pam Swakarsa dibentuk sebagai bagian dari Operasi Mantap yang digelar TNI menjelang Sidang Istimewa. Wiranto terlibat pertemuan yang mengkoordinasikan pergerakan pasukan milisi itu. Pada 9 November 1998, sekitar pukul 09.00-10.00, dilakukan rapat di rumah dinas Wiranto di Kompleks Menteri, Jalan Denpasar Raya, Jakarta. Hadir dalam pertemuan itu antara lain: Pangab Jenderal Wiranto, Pangdam Jaya Mayjen Djadja Suparman, Kapolda Metro Jaya Mayjen Noegroho Djajoesman, dan Mayjen Kivlan

elit politik yang tergabung dalam Barisan Nasional (Barnas), seperti Letjen (Purn.) Achmad Kemal Idris, Ali Sadikin, Hoegeng Iman Santoso, Jenderal (Purn.) Edi Sudradjat dan Solichin G.P.<sup>21</sup>

Penentangan dan pendukung terhadap pemerintahan B.J. Habibie ini berakhir dengan “kemenangan” kelompok pendukung B.J. Habibie. Hal ini karena tuntutan untuk menjatuhkan B.J. Habibie melalui Sidang Istimewa (SI) MPR tidak berhasil dilaksanakan. Namun dalam perkembangannya kemudian, untuk meredam gerakan mahasiswa yang menuntut pengunduran dirinya, B.J. Habibie mempercepat pelaksanaan pemilihan umum dari yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2002 dimajukan ke tahun 1999.




---

Zen. Soal pendanaan awal, Wiranto mengarahkan Kivlan untuk bertemu pengusaha Setiawan Djody dan staf wakil presiden, Jimmly Ashiddiqie, Pangdam Jaya Mayjen Djadja Suparman, Kapolda Metro Jaya Mayjen Noegroho Djajoesman, dan Mayjen Kivlan Zen. Sementara Mayjen Kivlan Zen dan Brigjen Adityawarman sebagai perwira yang mengkoordinir di lapangan. Lihat, *Mantan Pamswakarsa Minta Pertanggungjawaban Wiranto* dalam *Kompas* 29 Juni 2004, *Furkon Digadang Militer, Nikmat Membawa Sengsara* dalam *Tempo* 23 November 1998, *Serial Konflik Elit* dalam *Tempo* 21 Juni 2004 dan *Kivlan Zen Tantang Wiranto ke Pengadilan* dalam *Kompas* 10 Juni 2004.

<sup>21</sup> Barnas didirikan sekitar bulan Mei 1998 oleh Letjen (Purn.) Achmad Kemal Idris bersama sejumlah tokoh oposisi lainnya, seperti Ali Sadikin, Hoegeng Iman Santoso, Jenderal (Purn.) Edi Sudradjat dan Solichin G.P.

**Universitas Indonesia**

**Tabel 1.1:**  
**Polarisasi Gerakan Mahasiswa**  
**Masa Pemerintahan B.J. Habibie**

ORGAN GERAKAN	ISU	AKTOR	STATEMENT
HMI/KAMMI	Mendukung B.J. Habibie	1. Anas Urbaningrum (HMI)  2. Fachri Hamzah (KAMMI)	"Mendukung Habibie sebagai Presiden menggantikan Pak Harto adalah semata-mata untuk menyelamatkan situasi transisi politik, dan itu yang terbaik untuk menyiapkan Pemilu. Konteksnya adalah untuk keselamatan pemerintahan, keselamatan transisi politik dan tidak ada kekosongan kekuasaan."  "Mendukung Habibie karena untuk membangun fondasi bagi demokrasi, kebebasan dan menyerahkan masyarakat untuk lebih partisipatif dalam semua hal, termasuk dalam media, kebebasan pers."
FORUM KOTA	Menolak B.J. Habibie dan mengusulkan pembentukan Komite Rakyat Indonesia alias pemerintah transisi pengganti pemerintah Habibie	1. Eli Salomo (Mhs ISTN)  2. Adian Napitupulu (Mhs UKI)	"Karena turunnya Soeharto bukan berarti masalah sudah selesai. Soeharto hanyalah salah satu poin dari reformasi total,?? Reformasi yang diinginkan FORKOT adalah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Forkot menganggap Habibie masih bagian dari era Soeharto, yang juga tak mampu menyelesaikan krisis ekonomi dan politik di negeri ini. Untuk menentang Habibie itulah Forkot meluncurkan program Komite Rakyat Indonesia (KRI). Selama komite itu belum terbentuk, segala kegiatan politik yang dilakukan pemerintahan Habibie tidak sah. Karena itulah kami menentang dilaksanakan SI MPR lalu".  "Kalau kami mengikuti agenda pemerintahan Habibie, berarti kami mengakuinya, padahal Habibie tidak mendapatkan legitimasi dari rakyat. Lihat saja, SI MPR hanyalah pentas drama. Buktinya, dwifungsi ABRI tidak bisa dicabut, dan Soeharto juga tidak bisa diadili".
FKSMJ	1. Menolak Naiknya Habibie sebagai Presiden dan mengusulkan pembentukan pemerintahan transisi dalam bentuk Presidium. 2. Bersama-sama dengan Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, dan Univ. Siliwangi mempertemukan Megawati, Amien Rais, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Abdurrahman Wahid	Sarbini (Mhs UNTAG, Jakarta)	"Menolak pengalihan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada BJ Habibie karena tidak sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Mereka juga mendesak kepada MPR mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban dan mencabut mandat yang telah diberikan kepada Soeharto." "Apa yang dikatakan Habibie ketika kami berdemonstrasi secara demokratis, kami dibilang mau kudeta. Kita sekarang menuntut perubahan total. Bila perlu lewat jalan revolusi. Walaupun banyak yang mati kami akan tetap berjuang. Pokoknya kami sudah tidak percaya lagi. Sampai kapanpun."

**Sumber:** Diolah dari wawancara dengan Anas Urbaningrum (HMI), Fachri Hamzah (KAMMI), Eli Salomo (Mhs ISTN), Adian Napitupulu (Mhs UKI), Sarbini (Mhs UNTAG) dan berbagai media massa, seperti *Kompas*, *Majalah Tempo*.

Pemilu 1999 yang dipercepat ini dilaksanakan pada bulan Juni 1999 dan diikuti oleh 48 partai politik yang menghasilkan perubahan konfigurasi kekuatan politik, baik di DPR maupun MPR. Pada Pemilu 1999 ini PDIP keluar sebagai pemenang, sementara Partai Golkar berada di urutan kedua. Selain itu, dalam pemilu 1999 partai-partai baru duduk di DPR, antara lain, PAN, PKB, PK, dan PBB.

Dalam pemilihan Presiden di MPR, kekuatan-kekuatan politik tersebut terbelah ke dalam kelompok pendukung Calon Presiden Megawati Soekarnoputri dan kelompok pendukung Calon Presiden B.J.Habibie yang dimotori oleh Golkar. Namun karena pertanggungjawaban B.J. Habibie ditolak oleh MPR, maka B.J. Habibie mengundurkan diri sebagai Calon Presiden dari Golkar. Pengunduran diri B.J. Habibie kemudian memunculkan Poros Tengah, yang dimotori oleh partai-partai Islam yang mencalonkan Abdurrahman Wahid, sehingga terjadi persaingan dalam pemilihan Presiden antara Megawati Soekarnoputri dengan Abdurrahman Wahid. Dalam persaingan ini, Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden, dan kekalahan Megawati Soekarnoputri sedikit terobati setelah terpilih sebagai Wakil Presiden untuk mendampingi Abdurrahman Wahid.

Namun situasi politik kemudian segera berubah setelah pemerintahan Abdurrahman Wahid mengecewakan berbagai kalangan yang puncaknya adalah tuntutan Sidang Istimewa (SI) untuk memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid. Sejumlah kebijakan kontroversial Abdurrahman Wahid yang mendapat resistensi dari berbagai kalangan telah pula membuat situasi politik semakin memburuk. Misalnya kebijakan pemberhentian M. Jusuf Kalla sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, pemberhentian Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Mentamben, pencopotan Hamzah Haz sebagai Menkokesra, pemberhentian Laksamana Sukardi sebagai Menteri BUMN, pengusulan pencabutan TAP MPR No. 25/MPR/1966 Tentang Larangan Ajaran Marxisme/Leninisme, pengusulan pembukaan hubungan dagang dengan Israel, pembubaran Departemen Sosial RI (Depsos), Departemen Penerangan RI (Deppen), Kasus *Buloggate* dan *Bruneigate*.

Begitu pula di tubuh militer. Secara institusional militer yang pada awalnya tidak resisten terhadap pencalonan dan terpilihnya Abdurrahman Wahid akhirnya

kemudian menjadi resisten setelah Abdurrahman Wahid menerapkan sejumlah kebijakan tidak populer di tubuh TNI. Pengusulan pencabutan TAP MPR No. 25/MPR/1966 Tentang Larangan Ajaran Marxisme/Leninisme dan terutama pemberhentian Jendral Wiranto sebagai Menkopolkam, pemberhentian Letjend. Fachrul Razi sebagai Wakil Panglima TNI yang merangkap Kasum TNI, pengangkatan Letjend. Agus Wirahadikusumah sebagai Pangkostrad telah mendorong terjadinya konflik internal TNI. Bahkan rencana pengangkatan Letjend. Agus Wirahadikusumah sebagai KSAD telah menimbulkan friksi di tubuh TNI AD dan memunculkan resistensi TNI AD terhadap kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Dari luar TNI, Ichlasul Amal mengamati hal itu dengan mengatakan:

“Sengaja atau tidak, Gus Dur mengadu-domba militer. Munculnya nama Agus Wirahadikusumah, misalnya, yang disebut-sebut akan naik menjadi KSAD, merupakan salah satu bukti. Kita tahu, AW (Agus Wirahadikusumah) sudah tidak didukung militer. Munculnya nama itu akan menimbulkan sak wasangka, kecurigaan. ... Politik “adu-domba” yang dilakukan Gus Dur justru mengkhawatirkan. Kalau Militer terpengaruh dan terpecah, kemudian berkoalisi dengan politisi sipil. Kalau ini terjadi, artinya ketidakpercayaan kepada Gus Dur semakin besar.”<sup>22</sup>

Sementara pengangkatan Agus Wirahadikusumah sebagai KSAD yang memunculkan perlawanan TNI terhadap Abdurrahman Wahid, dari TNI dalam hal ini diakui oleh Letjend. (Purn) Agus Widjojo dengan mengatakan:

“Contohnya adalah tafsiran Gus Dur atas supremasi sipil, saya mencoba menafsirkan, bahwa seolah-olah sebagai panglima tertinggi, Gus Dur mempunyai kewenangan tak terbatas atas TNI, termasuk dalam menjangkau masuk sangat dalam ke dalam TNI, seolah-olah Gus Dur bisa memilih perwira siapa pun yang siap dijadikan Panglima TNI. Disinilah mencuat kasus Letjend. Agus Wirahadikusumah. Yang menimbulkan gejala perlawanan dari internal TNI khususnya TNI AD. Di sini kita melihat ujian-ujian yang paling tajam bagi TNI dalam perannya yang baru untuk tidak terlibat dalam politik”<sup>23</sup>

Secara personal sebenarnya perwira militer sejak awal memiliki sikap yang berbeda dalam pencalonan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. Meskipun secara institusional pencalonan Abdurrahman Wahid didukung oleh militer, namun tetap terdapat perwira TNI yang tampak resisten terhadap pencalonan dan

<sup>22</sup> Lihat *Gus Dur Tampaknya Mengadu-domba Militer* dalam Koran *Tempo*, Selasa, 22 Mei 2001.

<sup>23</sup> Wawancara Penulis dengan Letjend (Purn.) Agus Widjojo, Kepala Staf Teritorial TNI, Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Selasa, 22 Juni 2010 di Jakarta.

terpilihnya Abdurrahman Wahid. Letjend.(Purn.) Fachrul Rozi Wakil Panglima TNI merangkap Kasum TNI, masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, mengatakan:

“Kalau masalah sikap ada dua. Satu, berbicara masalah garis komando, TNI itu pasti taat kepada Presiden karena bagaimanapun Presiden adalah Panglima tertinggi TNI, tapi pada saat itu kan TNI masih punya fungsi demokrasinya, masih ada faksi TNI dan lain sebagainya, kalau dari aspek itu, yah bagaimana pun TNI melihat mungkin ada putra atau putri dari bangsa yang lebih baik untuk menjadi Presiden ke depan, terutama kan Gus Dur ini sangat membatasi yah, terutama membatasi dia untuk menunjukkan kapasitasnya selaku Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau dilihat dari aspek yang kedua ini, yah memang kalau ada calon dari kami, atau upaya untuk mengganti beliau dengan yang lain yang lebih baik, kami dukung. Ada *joke* teman, salah satu pejabat dulu pernah mengatakan begini, “saya tidak mengatakan Gus Dur itu jelek, tapi bagaimanapun *handycap* penglihatannya itu menyebabkan bangsa ini menjadi payah”. Waktu itu ada yang mengatakan, waktu itu kan wakilnya Bu Mega, “ bagaimana dengan Bu Mega? Karena bagaimana pun Bu Mega masih bisa melihat lah, mungkin itu masih lebih baik gitu”. Jadi kembali ke masalah tadi, bagaimana sikap TNI terhadap Gus Dur sebagai Presiden, kalau ngomong dari segi garis komando, pasti lah, gak mungkin ada perintah *anu* yang tidak ditaati oleh TNI, tapi kalau ngomong dalam dunia demokrasi, dimana TNI punya hak bersuara, punya hak memilih dan lain sebagainya, maka kita berpikir lebih baik punya Presiden yang *handycapnya* terbataslah, artinya jangan sampai *handycapnya* tidak bisa melihat. Sangat menyulitkan itu, apalagi nanti kalau ada pembisik ini lain, pembisik itu lain dan sebagainya. Tapi kalau masalah pencopotan saya, saya gak mempersoalkan itu, karena bagaimana pun, meskipun itu datangnya dari pembisik ini pembisik itu, itu sudah sebuah keputusan komando, kita taat. Kedua, mungkin sebagai manusia kita punya pilihan, kalau kita sudah tidak mempunyai *trust* dengan pemimpin kemudian kita digeser yah udah, *Alhamdulillah*. Tapi kalau menurut saya, karna *handycapnya* yang gak bisa melihat itu, acapkali dia mempromosikan orang yang salah. Mempromosikan orang yang salah itu akan merusak sistem, katakanlah, ada bisikan yang bagus jadi KSAD Si A, tapi di mata orang banyak, loh, kok dia. Tetapi karna dia hanya mengandalkan bisikan, yah akhirnya bisa salah, kemudian juga gitu, calon Panglima TNI, calon Kapolri dulu sempat friksi yah, kemudian kami melihat kemudian mempromosikan (mengangkat) Agus Wirahadikusumah, dikatakan berlebihan, padahal sebetulnya teman-teman dari TNI tahu, seperti apa Agus itu, kalau Agus Widjoyo pantaslah, memang dari dulu dia pemikir yah, kalau ini kan gak, tiba-tiba dipromosikan karena hanya bisikan-bisikan yah, jadi bagi kita mengganggu.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Wawancara dengan Letjend.(Purn.) Fachrul Rozi Wakil Panglima TNI dan Kasum TNI, Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Selasa, 22 Juni 2010 di Jakarta.

Begitu juga di tubuh gerakan mahasiswa, muncul gerakan mahasiswa yang mendukung dan menentang Abdurrahman Wahid. Terjadi polarisasi antara gerakan yang mendukung Abdurrahman Wahid dan gerakan yang menentang Abdurrahman Wahid. Kelompok yang menentang Abdurrahman Wahid adalah organ gerakan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia (BEMSI), Aliansi Lembaga Formal Kemahasiswaan Se-Indonesia (ALFONSO) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Sebagian besar dari mahasiswa yang terjebak dalam polemik ini adalah kalangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Diantaranya yang cukup dominan dalam melakukan aksi-aksi massa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia (BEMSI) yang melakukan penolakan terhadap Abdurrahman Wahid lewat isu *Buloggate*, *Bruneigate* dan mengusulkan segera dilakukannya Sidang Istimewa MPR/DPR. Aliansi BEMSI terdiri atas BEM ITB, BEM UI dan Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti. Koordinator BEMSI dipegang oleh Sigit Prasetyo (ITB), sedangkan humas dipegang oleh Taufik Riyadi (UI). Mengenai aksi-aksi BEMSI, Taufik Riyadi, Ketua BEM UI, Aktivis BEMSI mengatakan:

“Pemerintah sudah gagal melaksanakan agenda reformasi, gagal memberi rasa aman dan ketenteraman kepada rakyat Indonesia. Bahwa penyelesaian masalah bangsa, titik awalnya Abdurrahman Wahid harus mundur”<sup>25</sup>

Aliansi Lembaga Formal Kemahasiswaan se-Indonesia (ALFONSO) sebelumnya bergabung dalam BEMSI. Kelompok ini berpisah karena perbedaan sikap politik dalam melihat pengunduran diri Abdurrahman Wahid belum cukup untuk memperbaiki negara. Kelompok ini lebih mengusung isu Revolusi Sistemik, selain menuntut pengunduran diri Presiden Abdurrahman Wahid, juga menuntut Amien Rais, Ketua MPR, mundur dan pembersihan Orde Baru serta pencabutan Dwi Fungsi ABRI. ALFONSO berasal dari 72 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Juru bicara ALFONSO adalah Burhanuddin Muhtadi, Presiden Mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta. Latar belakang aktivis ALFONSO didominasi oleh aktivis HMI dan IMM. Burhanuddin Muhtadi, Aktivis ALFONSO, mengatakan:

---

<sup>25</sup> Lihat *Gerakan Mahasiswa Terpolarisasi Oleh Rekayasa "Mafia" Politik* dalam *Kompas*, 31 Maret 2001.

“Kepercayaan masyarakat luntur karena Pemerintahan Abdurrahman Wahid telah menggunakan sayap kekuasaannya untuk semakin membodohi rakyat. Karena itu kami ingin Abdurrahman Wahid segera mundur”<sup>26</sup>

Kelompok pendukung Abdurrahman Wahid adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia (BEMI). BEMI dideklarasikan di Yogyakarta, tanggal 2 Maret 2001. BEMI muncul karena BEMSI di bawah kendali BEM Universitas Indonesia, BEM ITB, BEM IPB dan BEM UNJ mengklaim BEM mereka adalah BEM Se-Indonesia. BEMI kebanyakan berbasis di sejumlah perguruan tinggi swasta dan negeri yang tidak digarap oleh BEMSI, seperti BEM Universitas Tarumanagara Jakarta, BEM Universitas Atma Jaya Jakarta, BEM IAIN Bandung, BEM Universitas Soegiopranoto Semarang, BEM IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, BEM IAIN Malang, BEM IAIN Surabaya, BEM UNISA, BEM UBHARA, BEM IKIP Surabaya, UBAYA, dan lain-lain.

Dalam rangka mendukung Abdurrahman Wahid ini, BEMI kemudian menyerang kelompok dan elit partai politik yang ingin menjatuhkan Abdurrahman Wahid. Arif Rahman, Aktivis BEMI, dari BEM Univ.Tarumanagara mengatakan:

“Mereka ini adalah orang-orang yang melakukan praktek-praktek penipuan, korupsi, nepotisme bersama KKN-nya Cendana. Mereka harus dikeluarkan dari DPR”.<sup>27</sup>

Menurut Arif Rahman, yang juga Koordinator BEMI, pembentukan BEMI itu sebagai wujud tanggung jawab moral terhadap situasi nasional, sebagai bukti BEMI tidak masuk dalam bingkai konflik elit politik, dan tetap setia di garis perjuangan moral. Karena itu BEMI melihat, tiga agenda penggalangan konsolidasi nasional, konsolidasi demokrasi, dan agenda kerakyatan dari 1998 lalu sampai sekarang belum terlaksana. Hal itu, menurut BEMI, karena masih kuatnya pengaruh kekuatan lama, yakni Orde Baru, di mana kekuatan Orde Baru yang dimotori Golkar menjadi hambatan besar untuk menuju transisi demokrasi.

Sedangkan FORKOT mengatakan bahwa BEM-UI sudah menjadi gerakan kepanjangan tangan elit politik. Adian Napitupulu, Mahasiswa UKI, Aktivis

<sup>26</sup> Lihat 67 *Perguruan Tinggi Minta Gus Dur Mundur* dalam *Rakyat Merdeka*, 20 Februari 2001.

<sup>27</sup> Lihat *Atma Jaya Minta Tanggung Jawab BEM SI* dalam *Tempo*, 11 Maret 2001

FORKOT melihat BEM-UI sudah menjadi gerakan kepanjangan tangan elit politik”.<sup>28</sup>

Di titik inilah polarisasi gerakan mahasiswa terjadi antara BEMI yang menuntut pembubaran Partai Golkar dan Pembersihan Orde Baru dan BEMSI yang meminta Abdurrahman Wahid mundur.<sup>29</sup> ALFONSO sebagai pecahan dari BEMSI juga menuntut agar Abdurrahman Wahid mengundurkan diri. Sedangkan HMI dan KAMMI menuntut Abdurrahman Wahid mundur karena sudah tak punya lagi legitimasi untuk memimpin bangsa. Selain polarisasi, juga terjadi perpecahan di kalangan internal gerakan mahasiswa di bawah naungan BEM. Dalam rangka menentang atau mendukung pemerintahan Abdurrahman Wahid, BEM terpecah menjadi BEMSI dan BEMI. Adanya BEMSI dan BEMI salah satunya disebabkan oleh perbedaan latar belakang motivasi dan orientasi politik para elit partai politik yang mendukungnya.

Studi yang mengambil kasus polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid merupakan kasus nasional. Kecuali FORKOT dan FKSMJ<sup>30</sup> yang hanya terdapat di Jakarta, empat organisasi gerakan mahasiswa lainnya yang diteliti, yaitu: HMI, KAMMI, BEMI dan BEMSI bukan saja organisasinya yang bersifat nasional, tetapi juga gerakannya berpusat di Jakarta, sehingga penelitiannya sudah cukup memadai dilaksanakan di Jakarta. Alasan lainnya adalah selain masing-masing anggota organisasi atau cabang mengikuti pertemuan secara nasional dan memiliki tujuan gerakan yang sama, yaitu mendukung dan menentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid, juga HMI, KAMMI, BEMI dan BEMSI melakukan gerakan secara nasional di Jakarta dengan mengikutsertakan perwakilan-perwakilan anggota organisasi atau cabang dari daerah-daerah.

Setidaknya ada empat alasan mengapa HMI, KAMMI, FKSMJ, BEMI dan BEMSI memilih mengkonsentrasikan gerakannya di Jakarta sambil anggota dan cabang-cabangnya melakukan gerakan yang sama di daerah masing-masing,

---

<sup>28</sup> Lihat *Aksi Demo BEM 12 Maret Dapat Tandingan* dalam *Gatra*, 10 Maret 2001.

<sup>29</sup> Lihat *BEMSI Minta Presiden Mundur* dalam *Kompas*, 31 Mei 2001.

<sup>30</sup> FKSMJ yang memiliki hubungan kultural dengan keberadaan FKPMJ (Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Jakarta) dan FKMIJ (Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta), lahir dari perjalanan panjang pertemuan aktivis senat mahasiswa se-Indonesia di era tahun 90-an yang berupaya melawan rezim Orde Baru.

yaitu: (1) B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid yang menjadi tujuan gerakan untuk dipertahankan dan dijatuhkan berkantor dan berdomisili di Jakarta; (2) elit politik terutama elit partai politik yang mendukung dan menentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid juga berkantor dan berdomisili di Jakarta; (3) Pengurus, pusat organisasi dan koordinator HMI, KAMMI, FKSMJ, BEMI dan BEMSI berada di Jakarta; (4) Hampir semua narasumber dan informan kunci berdomisili di Jakarta.<sup>31</sup> Keseluruhan alasan tersebut menjadi dasar argumen untuk menetapkan bahwa penelitian studi ini bersifat nasional, sehingga sudah memadai bila dilakukan di Jakarta saja.

Adapun Polarisasi gerakan mahasiswa dalam studi ini didefinisikan sebagai pembagian ke dalam dua gerakan mahasiswa pendukung dan penentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid yang saling berlawanan atau berhadapan.<sup>32</sup> Polarisasi antara HMI dan KAMMI yang mendukung B.J. Habibie melawan FORKOT dan FKSMJ yang menentang B.J. Habibie, polarisasi antara BEMI yang mendukung Abdurrahman Wahid melawan BEMSI yang menentang Abdurrahman Wahid. Sedangkan gerakan politik dalam studi ini didefinisikan sebagai semua gerakan mahasiswa ekstra universitas (HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ) dan intra universitas (BEMI dan BEMSI) dalam bentuk aksi-aksi demonstrasi yang bertujuan mempertahankan atau menjatuhkan kekuasaan Presiden B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid.<sup>33</sup>

BEMSI, misalnya, yang menentang dan berjuang agar Abdurrahman Wahid mundur dari jabatannya didukung oleh para elit partai politik yang juga menginginkan kejatuhan Abdurrahman Wahid, seperti Amien Rais, Akbar Tanjung, Fuad Bawazier, dan Bachtiar Chamsjah. Sebaliknya, BEMI yang mendukung dan berjuang agar Abdurrahman Wahid tidak mundur dari jabatannya

<sup>31</sup> Quddus Salam (Koodinator BEMI Jawa Timur), merupakan narasumber yang berdomisili di Surabaya, namun wawancara dan penelitian tetap dilakukan di Jakarta.

<sup>32</sup> Pengertian polarisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang berkepentingan, dan sebagainya) yang berlawanan. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*, Edisi IV, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 1089. *Polarization* mengandung arti pekerjaan mengutub. Lihat J. ST. Djamaris, *Kamus Besar Bahasa Inggris*, Jakarta: Citra Harta Prima, 2001, hal. 264.

<sup>33</sup> Studi dan tulisan Philip G. Altbach tentang *Students and Politics* dalam Seymour Martin Lipset (ed.), *Student and Politics*, New York-London: Basic Bookss, Inc., 1967 dan, *Politik dan Mahasiswa Perspektif dan Kecenderungan Masa Kini*, Jakarta: PT. Gramedia, 1988, sudah cukup kuat untuk menyebut gerakan mahasiswa sebagai gerakan politik.

didukung oleh para elit partai politik yang ingin mempertahankan Abdurrahman Wahid, seperti, Muhaimin Iskandar, Muhyidin Arubusman, Effendy Choiry, Adhie Massardi dan lain-lain.<sup>34</sup> Dengan demikian perseteruan antara BEMSI dan BEMI secara tidak langsung merupakan gambaran perseteruan antara elit-elit politik terutama elit partai politik yang menentang dan mendukung Abdurrahman Wahid.

Konflik antara BEMSI dan BEMI terjadi karena keduanya telah menjadi alat politik para elit partai politik yang sedang berseteru. Politisasi BEMSI dan BEMI membuatnya sulit melihat persoalan Abdurrahman Wahid secara obyektif. BEMSI, misalnya, tidak melihat masalah internal pemerintahan Abdurrahman Wahid sebagai alasan untuk “memaafkan” Abdurrahman Wahid, sebagaimana alasan yang digunakan BEMI untuk mempertahankan Abdurrahman Wahid. BEMSI justru menjadikan kelemahan pemerintahan Abdurrahman Wahid untuk menjatuhkan Abdurrahman Wahid. Bagi BEMSI kejatuhan Abdurrahman Wahid disebabkan oleh pemerintahannya yang tidak demokratis, tidak transparan, tidak akuntabel, tidak kredibel dan terlibat dalam skandal *Buloggate* dan *Bruneigate*.<sup>35</sup>

Sebaliknya, BEMI melihat faktor kesulitan dan beban berat Abdurrahman Wahid sebagai alasan untuk tetap mempertahankan Abdurrahman Wahid. Bagi BEMI, ketidakstabilan pemerintahan Abdurrahman Wahid justru disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) “Kabinet Persatuan” yang disusun dari kelompok-kelompok yang saling berhadap-hadapan; (2) manuver politik elit partai politik dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi dan politik; dan (3) krisis multi dimensi yang diwarisinya dari pemerintahan sebelumnya. Mengenai konflik

<sup>34</sup> Rakyat Merdeka menyebut inisial WW (Wimar Witoelar), EW (Erna Witoelar), MS (Marsilam Simanjuntak), BG (Bondan Gunawan) dan AM (Adhie Massardi) adalah sebagian tokoh-tokoh yang berada di balik aksi-aksi pro Gus Dur. Lihat Anti dan Pro Gus Dur Saling Tuding; *Massa Disetir Dari Hotel* dalam *Rakyat Merdeka*, 12 Februari 2001.

<sup>35</sup> Berbagai kebijakan Gus Dur terkait dengan reformasi yang dinilai oleh banyak pihak sebagai keberanian yang aneh justru menjadi sebab-sebab utama kejatuhannya. Dengan demikian alasan para penantangannya bahwa Gus Dur tidak reformis menjadi tidak relevan. Diantara kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang dinilai menjadi sebab-sebab kejatuhannya adalah (1) pemecatan terhadap Jenderal Tni (Purn) Wiranto sebagai Menkopolkam, (2) penonaktifan Jenderal Polisi Surojo Bimantoro sebagai Kapolri, (3) pencopotan Jusuf Kalla (Golkar) sebagai Menperindag, (4) pencopotan Laksamana Sukardi (PDI-P) sebagai Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, (5) pemberhentian Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Mentamben, (6) pemberhentian Marzuki Darusman (Golkar) sebagai Jaksa Agung, (7) pengusulan pencabutan TAP MPR No. 25/MPR/1966 Tentang Larangan Ajaran Marxisme/Leninisme, (8) pengusulan pembukaan hubungan dagang dengan Israel, (9) pembubaran Departemen Sosial RI (Depsos) dan Departemen Penerangan RI (Deppen).

terbuka antara Abdurrahman Wahid dan para elit partai politik besar di DPR, Syamsuddin Haris mengatakan:

“Konflik terbuka antara Abdurrahman Wahid dan para politisi partai politik besar DPR di luar PKB, mulai muncul ketika Presiden Wahid menekan Hamzah Haz dari jabatannya sebagai Menko Kesra dan Taskin, kemudian mencopot Laksamana Sukardi sebagai Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, dan Jusuf Kalla sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan tuduhan terlibat KKN.”<sup>36</sup>

Meluasnya dukungan terhadap aksi-aksi BEMSI dan BEMI seiring dengan meluasnya konflik antara elit partai politik yang menentang dan mendukung Abdurrahman Wahid di MPR/DPR. Indikasi meluasnya dukungan elit partai politik di DPR terhadap aksi massa BEMSI dapat dicermati dari peringatan Muhaimin Iskandar Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB yang ditujukan kepada para elit partai politik yang anti Abdurrahman Wahid. Muhaimin Iskandar mengingatkan agar para politisi tidak merekayasa massa di luar gedung DPR untuk datang pada saat Pansus memberikan laporannya kepada Rapat Paripurna DPR tanggal 29 Januari 2001.<sup>37</sup>

Selain elit politik partai Golkar, PDI-P dan PAN, elit Partai Keadilan (PK)<sup>38</sup> juga dituding berada di balik aksi-aksi BEMSI. Hal itu dikaitkan dengan kemunculan BEMSI yang difasilitasi oleh KAMMI. KAMMI sebagai organisasi mahasiswa ekstra universiter dinilai berafiliasi kepada PK, sehingga langsung maupun tidak langsung aksi-aksi BEMSI yang menolak Abdurrahman Wahid banyak didukung oleh KAMMI. Oleh karena itu kebijakan Abdurrahman Wahid yang secara mendadak memberhentikan Nurmahmudi Ismail dari jabatannya sebagai Menteri Kehutanan di tengah menguatnya aksi-aksi demonstrasi penentang Abdurrahman Wahid dinilai terkait dengan maraknya aksi-aksi BEMSI dan KAMMI. Namun menurut para pendukung Abdurrahman Wahid, pemberhentian anggota Kabinet Persatuan dari kader PK ini dilakukan dengan alasan antara lain: (1) selain perbedaan visi, Nurmahmudi Ismail juga sering mengambil kebijakan bertentangan dengan keinginan Abdurrahman Wahid;

<sup>36</sup> Syamsuddin Haris, *Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007, hal. 139.

<sup>37</sup> Lihat *Skenarionya Amien* dalam *Suara Karya*, 26 Januari 2001.

<sup>38</sup> Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang *electoral threshold* Partai Keadilan (PK) berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk dapat mengikuti Pemilu Tahun 2004.

(2) Nurmahmudi Ismail dinilai tidak bisa mengendalikan partainya, termasuk ketidakmampuannya mengatasi dukungan elit PK terhadap aksi-aksi menentang Abdurrahman Wahid.

Menghadapi aksi-aksi BEMSI yang semakin intens, elit NU dan PKB di DPR juga mendukung kemunculan BEMI untuk mengimbangi dan menghadang aksi-aksi BEMSI. Sejak itulah konflik antara BEMSI dan BEMI semakin tajam. BEMSI yang menentang Abdurrahman Wahid memiliki basis kuat di UI, Universitas Trisakti, UNJ dan IPB, meskipun memiliki jaringan di seluruh Indonesia. Sedangkan BEMI yang mendukung Abdurrahman Wahid memperluas basisnya hingga ke perguruan tinggi besar di luar Jakarta. PMII yang sangat dekat dengan elit NU dan PKB melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh KAMMI yang dekat dengan PK berjuang berebut pengaruh dan simpati masyarakat. Selain itu tujuan PMII membantu kemunculan BEMI adalah untuk mencegah agar kekuatan BEMSI dan KAMMI tidak meluas seperti dalam aksinya menentang rezim Orde Baru.<sup>39</sup>

Dalam skala yang lebih luas, konflik BEMSI dan BEMI yang saling berhadapan-hadapan itu semakin tampak sebagai miniatur konflik antara elit partai politik yang mendukung dan menentang Abdurrahman Wahid. Penentangan dan pendukung aksi-aksi BEMSI dan BEMI juga semakin tampak sebagai produk dari ketegangan antara Presiden Abdurrahman Wahid bersama elit partai politik pendukung Abdurrahman Wahid, seperti Muhaimin Iskandar, Muhyidin Arubusman, Ali Maskur Musa dan Effendy Choiry dari PKB melawan para elit partai politik yang menentang Abdurrahman Wahid (Partai Golkar, PPP, PAN, PDI-P dan PK) baik di legislatif maupun di eksekutif yang berlanjut dengan kejatuhan Abdurrahman Wahid. Dengan kata lain, konflik dan maraknya aksi-aksi BEMSI dan BEMI juga harus dilihat sebagai dampak dari kerjasama antara para elit politik terutama elit partai politik dengan para aktivis gerakan mahasiswa di kampus-kampus.

---

<sup>39</sup> Kekuatan dukungan yang diperoleh KAMMI sudah terbukti seperti dalam “Rapat Umum Mahasiswa dan Rakyat Indonesia” yang menuntut reformasi total di lapangan Masjid Al-Azhar Jakarta, 10 April 1998 yang berhasil menggerakkan massa mahasiswa secara spektakuler.

**Tabel 1.2**  
**Polarisasi Gerakan Mahasiswa**  
**Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid**

NAMA ORGAN	ISU	TUNTUTAN	PERNYATAAN
<b>HMI</b>	Kebijakan Abdurrahman Wahid yang tdiak pro-Islam, kontroversial dan yang meresahkan masyarakat	Menuntut Abdurrahman Wahid Mundur	<b>M. Fakhruddin (Ketua Umum PB HMI):</b> banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya, kesalah Gus Dur pada arogansi, pernyataannya yang kontroversial soal HMI misalnya bubarkan HMI dan HMI <i>connection</i> .
<b>KAMMI</b>	Abdurrahman Wahid mundur karena melanggar konstitusi	Sidang Istimewa untuk menurunkan Abdurrahman Wahid	<b>Andi Rahmat (Ketua Umum KAMMI PUSAT) :</b> "Kami menuntut Presiden Abdurrahman Wahid mundur secara terhormat. Ini adalah seruan konstitusional. Abdurrahman Wahid sudah tak punya lagi legitimasi untuk memimpin bangsa."
<b>BEMI</b>	Menuntut pembubaran Partai Golkar dan mengadili antek-anteknya. Beberapa antek Golkar yang disebut di antaranya adalah Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua Fraksi Partai Golkar Ginandjar Kartasasmita, Fuad Bawazier, B.J. Habibie dan Arifin Panigoro.	Tuntut Pembubaran Golkar, pembersihan Orde Baru dan pemilu dipercepat	<b>Arif Rahman (Mhs Univ Tarumanagara) :</b> "Mereka ini adalah orang-orang yang melakukan praktek-praktek penipuan, korupsi, nepotisme bersama KKN-nya Cendana. Mereka harus dibubarkan dari DPR." <b>Quddus Salam (Mhs IAIN Surabaya):</b> "Kita terus melakukan konsolidasi dengan daerah yang lain untuk mengkampanyekan pemilu dipercepat."
<b>BEMSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tegakkan supremasi hukum</li> <li>2. Amandemen UUD 45</li> <li>3. Berantas praktek KKN</li> <li>4. Adili Soeharto</li> <li>5. Cabut Dwi Fungsi ABRI</li> <li>6. Otonomi Daerah seluas-luasnya</li> <li>7. Reformasi Sistem Pendidikan</li> <li>8. Lakukan <i>recovery</i> ekonomi</li> <li>9. Tolak militerisasi sipil</li> </ol>	Meminta Presiden Abdurrahman Wahid bersikap arif dan bijak dengan secepatnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai konsekuensi dari kegagalan meneruskan agenda reformasi demi kepentingan bangsa. Kedua, menuntut secepatnya dilakukan pemulihan ekonomi agar rakyat tidak terbebani dengan kesulitan yang melilit leher, akibat kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik. Ketiga, menuntut pendidikan yang terjangkau oleh seluruh kalangan masyarakat, sehingga tercapai pemerataan pendidikan. Keempat, menolak kenaikan BBM sekarang karena itu akan membebani masyarakat, terutama kalangan ekonomi lemah. Terakhir, menuntut dilaksanakannya visi reformasi secara konsisten dan menyeluruh, termasuk tuntutan pengadilan terhadap elemen orba tanpa pandang bulu.	<b>Sigit Prasetyo (Mhs ITB) :</b> "Kami meminta bisa bertemu langsung dengan Presiden, agar bisa menyampaikan langsung tuntutan kami, termasuk dengan nuansa-nuansa yang kami bawa tanpa lewat orang kedua. Kedua, kami meminta lewat para menteri itu untuk lebih melihat realitas yang ada di masyarakat, dan menyampaikan tuntutan dari mahasiswa untuk disampaikan kepada Presiden agar dia bisa lebih bersikap bijak, dengan mundur dari jabatannya." <b>Taufik Riyadi (Mhs UI):</b> "Pemerintah sudah gagal melaksanakan agenda reformasi, gagal memberi rasa aman dan ketenteraman kepada rakyat Indonesia. Bahwa penyelesaian masalah bangsa, titik awalnya Abdurrahman Wahid harus mundur"

**Sumber:** Diolah dari wawancara dengan M. Fakhruddin (Ketua Umum PB HMI), Arif Rahman dan Quddus Salam (Aktivis BEMI), Fachri Hamzah (KAMMI), Andre Rosiade dan Taufik Riyadi (Aktivis BEMSI) dan dari berbagai media massa, seperti *Kompas*, Majalah *Tempo*.

Polarisasi gerakan mahasiswa baik pada masa Pemerintahan B.J. Habibie maupun pada masa Abdurrahman Wahid, selain karena faktor peranan elit politik juga dipengaruhi oleh ideologi politik masing-masing gerakan mahasiswa. Pada masa B.J. Habibie, gerakan mahasiswa yang mendukung B.J. Habibie adalah gerakan mahasiswa yang mengusung ideologi Islam, seperti HMI, KAMMI dan HAMMAS. Sedangkan kelompok yang menentang B.J. Habibie adalah gerakan mahasiswa yang berlatar belakang ideologi nasionalis sekuler dan/atau ideologi kiri, seperti FORKOT, FAMRED dan LMND.

Polarisasi gerakan mahasiswa berdasar ideologi selain terjadi pada masa B.J. Habibie, juga terjadi pada masa Abdurrahman Wahid. Adapun gerakan mahasiswa yang menentang Abdurrahman Wahid adalah justru gerakan mahasiswa yang berideologi Islam, seperti BEMSI. Sedangkan gerakan mahasiswa yang mendukung Abdurrahman Wahid adalah gerakan mahasiswa yang tergabung dalam BEMI yang berideologi nasionalis atau sekuler/plural.

Berdasarkan penjelasan tersebut yang menjadi pokok masalah studi ini adalah polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie dan masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Berkaitan dengan pokok masalah itu ada empat pertanyaan pokok yang ingin dijawab dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa terjadi polarisasi gerakan mahasiswa pada masa Pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya polarisasi gerakan mahasiswa pada masa Pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid?
3. Apakah kepentingan politik dan ideologi mahasiswa dan elit politik mempengaruhi polarisasi gerakan mahasiswa?
4. Bagaimana dan sejauh mana peran elit partai politik dalam gerakan mahasiswa pada masa Pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid?

### **1. 3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah dan rumusan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan sebab-sebab terjadinya polarisasi gerakan mahasiswa pada masa Pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid.

2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya polarisasi gerakan mahasiswa pada masa Pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid.
3. Menjelaskan kepentingan politik dan ideologi mahasiswa dan elit politik mempengaruhi polarisasi gerakan mahasiswa.
4. Menggambarkan dan menjelaskan peran elit partai politik dalam gerakan mahasiswa pada masa Pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid.

#### 1. 4. Signifikansi Penelitian

Ada tiga signifikansi dari penelitian ini, yaitu: (1) dapat memberi sumbangan pemikiran tentang gerakan politik dan konflik politik gerakan mahasiswa. Signifikansi teoritik dari penelitian ini adalah kontribusinya pada gerakan politik dan konflik politik. Selama ini kajian tentang gerakan mahasiswa lebih banyak melihat dari aspek perubahan sosial, sementara studi ini menjelaskan dalam perspektif gerakan politik dan konflik politik; (2) dapat menjadi rujukan dan bagi peneliti selanjutnya terkait dengan gerakan mahasiswa sebagai gerakan politik; (3) dapat memperluas wawasan intelektual peneliti terhadap obyek studi.

#### 1.5. Kajian Literatur

Kajian tentang gerakan mahasiswa telah dilakukan oleh para akademisi, penulis dan peneliti baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri kajian tentang kehidupan mahasiswa terutama mengenai protes mahasiswa telah dilakukan oleh para akademisi, penulis dan peneliti, seperti Donald K. Emmerson,<sup>40</sup> Thomas A. Murray,<sup>41</sup> Theodore Smith dan Harold F. Carpenter,<sup>42</sup> Seymour Martin Lipset,<sup>43</sup> Nan Lin,<sup>44</sup>

<sup>40</sup> Lihat Donald K. Emmerson, "Students and Establishment in Indonesia: The Status Generation Gap" dalam W. Howard Wriggins dan James F. Guyot (peny.), *Population, Politics and the Future of Southern Asia*, Colombia: University Press, 1973.

<sup>41</sup> Lihat Thomas A. Murray, *Effects of Indonesian Population Growth on Educational Development, 1940-1968* dalam Asian Survey Juli 1969.

<sup>42</sup> Lihat Theodore Smith dan Harold F. Carpenter, *Indonesian University Students and Their Career Aspiration* dalam Asian Survey, 1974.

<sup>43</sup> Lihat Seymour Martin Lipset, *Rebellion in the University*, Chicago: The University of Chicago Press, 1976. Seymour Martin Lipset (eds.), *Student Politics*, New York-London: Basic Book Inc, 1967, page. 74-93. Seymour Martin Lipset dan Philip G. Altbach (eds.), *Students in Revolt*, Boston: Houghton Mifflin and Co., 1969. Seymour Martin Lipset and Sheldon S.Wolin (eds), *The Berkeley Student Revolt Facts and Interpretations*, New York: Anchor Books Doubleday & Company, Inc. Garden City, 1965.

<sup>44</sup> Lihat Nan Lin, *Social Movement dalam Encyclopedia of Sociology*. New York: MacMillan Publishing Company, 1992.

Philip G. Altbach,<sup>45</sup> Stephen A. Douglas,<sup>46</sup> K. Keniston,<sup>47</sup> L.C. Kerpelman,<sup>48</sup> L.S. Feuer,<sup>49</sup> Patrick Seale,<sup>50</sup> dan lain-lain. Sedangkan dari dalam negeri kajian tentang protes atau gerakan mahasiswa telah pula dilakukan oleh para akademisi, penulis dan peneliti, seperti Burhan D. Magenda,<sup>51</sup> Chusnul Mar'iyah,<sup>52</sup> Sarlito Wirawan,<sup>53</sup> Suwondo,<sup>54</sup> Arbi Sanit,<sup>55</sup> Fachry Ali,<sup>56</sup> Harsja W. Bachtiar,<sup>57</sup> Arif Budiman,<sup>58</sup> Selo Soemardjan,<sup>59</sup> Muridan S. Widjojo,<sup>60</sup> Yozar Anwar,<sup>61</sup> Suharsih dan Ign. Mahendra K.,<sup>62</sup> Muchtar E. Harahap dan Andris Basril,<sup>63</sup> Abdul Wahab Situmorang,<sup>64</sup> Supardjan,<sup>65</sup> dan lain-lain.<sup>66</sup>

<sup>45</sup> Lihat Philip G. Altbach, *Politik dan Mahasiswa: Perspektif dan Kecenderungan Masa Kini*, Jakarta: PT. Gramedia, 1988.

<sup>46</sup> Lihat Stephen A. Douglas, *Political Socialization and Students Activism in Indonesia*, University of Illinois Press, 1970.

<sup>47</sup> Lihat K. Keniston, *Young Radical*, New York: Harcourt Brace and World Inc., 1968.

<sup>48</sup> Lihat K. Keniston, *Youth and Dissent*, New York: Harcourt Brace and World Inc., 1971.

<sup>48</sup> Lihat L.C. Kerpelman, "Student Political Activism and Ideologi: Comparative Characteristics of Activists and Non-activists" dalam *Journal of Counseling Psychology*, Volume 16, 1969, hal. 8-13.

<sup>49</sup> Lihat L.S. Feuer, *The Conflict of Generations, the Character and Significance of Student Movement*, London: Heinemann, 1969.

<sup>50</sup> Lihat Patrick Seale dan Maureen McConville, *Pemberontakan Mahasiswa Revolusi Perancis, Mei 1968*, (terjemahan), Yogyakarta: Yayasan Litera Indonesia, 2000.

<sup>51</sup> Lihat Burhan D. Magenda, "Gerakan Mahasiswa dan Hubungannya dengan Sistem Politik: Suatu Tinjauan" dalam *Analisa Kekuatan Politik Di Indonesia Pilihan Artikel Prisma*, Jakarta: LP3ES, 1988, hal. 130-148.

<sup>52</sup> Lihat Chusnul Mar'iyah, *The Jakarta Post*, *Student Movements Must Not Be Used for Political Gain*, March 16<sup>th</sup> 2000.

<sup>53</sup> Lihat Sarlito Wirawan Sarwono, *Perbedaan Antara Pemimpin Dan Aktivitas Dalam Gerakan Protes Mahasiswa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

<sup>54</sup> Lihat Suwondo, *Gerakan Mahasiswa Bandar Lampung: Tinjauan Dalam Dimensi Politik*, disertasi Pasca Sarjana Politik UI.

<sup>55</sup> Lihat Arbi Sanit, *Mahasiswa Kekuasaan dan Bangsa: Refleksi dan Gagasan Alternatif*, Lingkaran Studi Indonesia, Jakarta: 1987. Arbi Sanit, *Mahasiswa, Kekuasaan dan Bangsa: Refleksi dan Gagasan Alternatif*, Jakarta: PT. Temprint, 1989. Arbi Sanit, *Pergolakan Melawan Kekuasaan: Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*, Yogyakarta: Insist Press, 1999.

<sup>56</sup> Lihat Fachry Ali, *Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara*, Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1985.

<sup>57</sup> Lihat Harsja W. Bachtiar, *Indonesia dalam Donald K. Emmerson (peny.)*, *Students and Politics and Developing Nations*, London: Pall Mall Press, 1968.

<sup>58</sup> Arif Budiman, *Students Movement In Indonesia* dalam Asian Survei, Juni 1978.

<sup>59</sup> Lihat Selo Soemardjan, ed., *Kisah Perjuangan Reformasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

<sup>60</sup> Lihat Muridan S. Widjojo, *Penakluk Rezim Orde Baru: Gerakan Mahasiswa '98*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

<sup>61</sup> Lihat Yozar Anwar, *Angkatan 66: Sebuah Catatan Harian Mahasiswa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1981. Yozar Anwar, *Pergolakan Mahasiswa Abad ke-20: Kisah Perjuangan Anak-Anak Muda Pemberang*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1981.

<sup>62</sup> Lihat Suharsih dan Ign. Mahendra K., *Bergerak Bersama Rakyat: Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: CV. Langit Aksara, 2007.

<sup>63</sup> Lihat Muchtar E. Harahap dan Andris Basril, *Gerakan Mahasiswa dan Politik Indonesia*, Jakarta: NSEAS, 1999.

Melalui pendekatannya masing-masing para akademisi, penulis dan peneliti tersebut berusaha menjelaskan aspek-aspek tertentu dari mahasiswa, antara lain seperti: (1) fungsi dan peran mahasiswa dalam sistem politik kolonial, sistem politik otoriter dan sistem politik demokratis; (2) kondisi obyektif dan subyektif yang melingkupi kehidupan mahasiswa; (3) radikalisme dan konservatisme gerakan mahasiswa; (4) peran mahasiswa dalam perubahan sosial; (5) sosialisasi politik, budaya politik dan partisipasi politik di dalam gerakan mahasiswa.

Burhan D. Magenda, misalnya, membahas gerakan mahasiswa dan hubungannya dengan sistem politik melalui pendekatan sistem politik.<sup>67</sup> Dengan membandingkan gerakan mahasiswa pada periode Demokrasi Parlementer (1950-1959), periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan periode Orde Baru (1965-1985), Burhan D. Megenda berusaha melihat perubahan dan kelanjutan yang terjadi sebagai akibat interaksi gerakan mahasiswa dan sistem politik Indonesia.

Ada dua kondisi yang melingkupi gerakan mahasiswa yang dibandingkan Burhan D. Magenda di tiga periode sistem politik tersebut, yaitu: (1) kondisi obyektif dengan variabel struktur umur dan sistem politik pada masa itu; (2) kondisi subyektif dengan variabel latar belakang sosial para mahasiswa, lapangan kerja bagi lulusan universitas dan sub-kultur mahasiswa. Dalam konteks ideologi, Burhan D. Magenda menyimpulkan bahwa proses sosialisasi politik yang dialami oleh mahasiswa dan pelajar pada masa Demokrasi Terpimpin justru menunjukkan kecenderungan ideologis.

Berbeda dengan Demokrasi Parlementer yang secara subyektif ditandai oleh ketiadaan gerakan mahasiswa yang berfungsi secara politik, pada masa Demokrasi Terpimpin terciptanya generasi yang sangat politis cara berpikirmya

<sup>64</sup> Lihat Abdul Wahab Situmorang, *Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

<sup>65</sup> Supardjan, *Mahasiswa dan Kemahasiswaan*, Jakarta: 1972.

<sup>66</sup> Lihat juga Denny J.A, *Gerakan Mahasiswa dan Politik Kaum Muda era 80-an*, Jakarta: CV. Miswar, 1990. Oebedilah, *Radikalisme Gerakan Mahasiswa: Studi Kasus HMI MPO Tahun 1998-2001*. Lelita Yunia, *Sosialisasi Politik Mahasiswa: Partisipasi Politik Forum Kota (Forkot) dalam gerakan 1998*. Soemitro, *Sukses, Militer dan Mahasiswa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. Hermawan Sulisty, *Lawan; Jejak-Jejak Jalanan di Balik Kejatuhan Soeharto*, Jakarta: Pensil-324, 2009. Haryadhie, *Perspektif Gerakan Mahasiswa 1978 dalam Percaturan Politik Nasional*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1997. Dody Rudianto, *Gerakan Mahasiswa dalam Perspektif Perubahan Politik Nasional*, Jakarta: Golden Terayon Press, 2010.

<sup>67</sup> Lihat Burhan D. Magenda, *Op. Cit.*, hal. 130-148.

terutama di kalangan golongan agama, nasionalis dan komunis terjadi setelah: (1) kursus-kursus kader diadakan tiap-tiap ormas; (2) pendidikan Manipol-Usdek di semua lembaga pendidikan; dan (3) indoktrinasi pada semua tingkat sosial. Di lain pihak, militer juga tampak tidak ingin ketinggalan dalam merangkul mahasiswa. Militer khususnya TNI AD justru membuka peranan mahasiswa dengan mengusahakan menjadi aktor dalam politik nasional sebagai kekuatan yang bebas dari partai. Akibatnya, proses mobilisasi politik menurut Burhan D. Magenda telah menyebabkan aktifnya organisasi-organisasi massa, —seperti organisasi mahasiswa, pelajar dan buruh— yang berafiliasi dan yang bebas dari partai politik baik secara horizontal maupun secara vertikal.

Burhan D. Magenda juga melihat bahwa sentralisasi kekuasaan pada masa Orde Baru justru membuat gerakan mahasiswa menjadi “*the only effective opposition*” dalam masyarakat. Renggangnya hubungan antara gerakan mahasiswa intra-universiter di dalam kampus dengan ormas mahasiswa ekstra-universiter di luar kampus yang berlangsung pada periode pasca tahun 1970-an menunjukkan gejala independensi yang makin tinggi dari gerakan mahasiswa. Dalam pandangan Burhan D. Magenda istilah “kekuatan moral” menunjukkan adanya gejala independensi yang makin tinggi dari gerakan mahasiswa yang diikuti oleh proses demokratisasi khususnya dalam pemilihan dewan-dewan mahasiswa. Burhan D. Magenda mengartikan “kekuatan moral”, yaitu gerakan mahasiswa hanya terpusat di kampus dan tidak memiliki ikatan organisatoris dengan kekuatan sosial politik di luarnya.

Namun Burhan D. Magenda juga melihat istilah “kekuatan moral” mengandung ambivalensi. Di satu sisi gerakan mahasiswa dengan “kekuatan moral” dapat mendengungkan etos egalitarian dan diorganisir secara romantik dengan *appeal* populis, tetapi di lain sisi akan kehilangan dukungan lantaran pengertian independensi yang menutup pihak luar memberi dukungan. Istilah “kekuatan moral” menurut Burhan D. Magenda hanya menjadikan gerakan mahasiswa sebagai “pelopor tanpa pengikut”.

Selain pendekatan sistem politik yang dilakukan Burhan D. Magenda, pendekatan lain seperti pendekatan psikologi juga digunakan oleh Sarlito Wirawan Sarwono untuk menjelaskan perbedaan antara pemimpin dan aktivis

dalam gerakan mahasiswa. Menggunakan pendekatan psikologi sosial dan massa yang direduksi dari teori hubungan manusia dengan komunitasnya, teori tentang perubahan sosial, teori tingkah laku massa dan teori tingkah laku agresif, Sarlito Wirawan Sarwono berusaha menjelaskan hubungan personal mahasiswa dengan masyarakat dan kedudukan mahasiswa di tengah-tengah masyarakat.<sup>68</sup> Untuk memperkuat kajiannya, Sarlito Wirawan Sarwono kemudian melakukan perbandingan protes mahasiswa di Turki, gerakan mahasiswa di Jepang khususnya Universitas Waseda, revolusi mahasiswa Prancis tahun 1968 dan demonstrasi mahasiswa di Bangkok-Muangthai 1973.

Studi Sarlito Wirawan Sarwono menyimpulkan bahwa meskipun dari sudut kepribadian terdapat mahasiswa yang lebih agresif dibanding mahasiswa-mahasiswa lainnya, tapi faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan-kegiatan protes mahasiswa merupakan cermin atau reaksi belaka atas kepincangan-kepincangan yang terjadi di dalam masyarakat. Studi Sarlito Wirawan Sarwono menolak pandangan yang menegaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan-kegiatan protes mahasiswa bersumber dari diri mahasiswa sendiri. Studi Sarlito Wirawan Sarwono juga tidak sependapat dengan cara penanganan represif terhadap gerakan mahasiswa, karena menurutnya hanya menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu Sarlito Wirawan Sarwono menawarkan suatu jalan keluar berkaitan dengan protes mahasiswa, yaitu mengurangi atau menghilangkan derivasi relatif yang ditimbulkan oleh jurang lebar antara “*value expectation*” dan “*value capabilities*”.

Pendekatan lainnya adalah pendekatan ideologi politik dan partisipasi politik. Glacio A.D. Soares membahas gerakan mahasiswa dengan menggunakan pendekatan ideologi politik dan partisipasi politik.<sup>69</sup> Menggunakan data-data proporsi mahasiswa Indian di perguruan tinggi Amerika Serikat, penganut Kristen Demokrat dan Sosialis di Italia, partisipasi politik mahasiswa di Uruguay dan Buenos Aires, kehidupan politik nasional di Cuba, Glacio A.D. Soares melihat

---

<sup>68</sup> Lihat Sarlito Wirawan Sarwono, *Perbedaan Antara Pemimpin Dan Aktivitas Dalam Gerakan Protes Mahasiswa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

<sup>69</sup> Lihat Glacio A.D. Soares. “*The Active Few: Student Ideologi and Participation in Developing Countries*” dalam Seymour Martin Lipset (eds.), *Student Politics*, New York-London: Basic Book Inc, 1967, page. 124-147.

adanya hubungan signifikan antara radikalisme-konservatisme dengan ideologi politik.

Studi Glacio A.D. Soares menegaskan bahwa radikalisme dan konservatisme gerakan mahasiswa sangat dipengaruhi ideologi politik yang dianut oleh mahasiswa, sedangkan partisipasi politik mahasiswa sangat ditentukan oleh kondisi kehidupan politik nasional yang sedang berlangsung. Glacio A.D. Soares berasumsi bahwa radikalisme dan konservatisme gerakan mahasiswa sangat dipengaruhi oleh ideologi yang dianut mahasiswa, sedangkan tinggi rendahnya partisipasi politik mahasiswa sangat dipengaruhi oleh kondisi kehidupan politik nasional. Partisipasi politik mahasiswa cenderung meningkat bila kondisi kehidupan politik nasional memburuk, dan sebaliknya cenderung mengalami penurunan bila kondisi kehidupan politik nasional membaik.

Selain pendekatan sistem politik, pendekatan psikologis, pendekatan ideologi politik dan partisipasi politik yang sudah dijelaskan di atas, pendekatan politik juga dilakukan oleh Philip G. Altbach.<sup>70</sup> Philip G. Altbach membahas gerakan mahasiswa di negara-negara berkembang dan negara-negara maju dengan menggunakan pendekatan politik. Menurut Philip G. Altbach gerakan mahasiswa di negara-negara berkembang, seperti Korea Selatan, Muangthai Afganistan dan Iran merupakan agen perubahan sosial. Sebaliknya, di negara-negara industri maju, seperti Eropa Barat dan Amerika Utara, gerakan mahasiswa merupakan penghambat bagi kapitalisme. Keterbelakangan sosial, ekonomi dan politik akibat ketertinggalan pembangunan di negara-negara berkembang, seperti kemiskinan, ketidakadilan, sistem yang tidak fungsional dan belum mantapnya norma-norma yang mengatur masyarakat merupakan penyebab munculnya gerakan mahasiswa.

Menurut Philip G. Altbach sikap kritis dan respon cepat mahasiswa terhadap kondisi sosial disebabkan oleh pendidikan yang telah memberinya posisi sebagai agen perubahan sosial dan sebagai calon elit nasional. Mahasiswa melakukan

---

<sup>70</sup> Lihat Philip G. Altbach, "Students and Politics" dalam Seymour Martin Lipset (eds.), *Student Politics*, New York-London: Basic Book Inc, 1967, page. 74-93. Seymour Martin Lipset dan Philip G. Altbach (eds.), *Students in Revolt*, Boston: Houghton Mifflin and Co., 1969. Seymour Martin Lipset dan Philip G. Altbach, "Students and Politics and Higher Education in the United States" dalam Seymour Martin Lipset (eds.), *Student Politics*, New York-London: Basic Book Inc, 1967, page. 199-252. Philip G. Altbach, *Politik dan Mahasiswa: Perspektif dan Kecenderungan Masa Kini*, Jakarta: PT. Gramedia, 1988.

gerakan untuk memperlihatkan posisi dan eksistensinya dalam mengakhiri kondisi sosial yang dinilainya tidak baik. Sebaliknya, —sejalan dengan S.L. Halleck dan Edward Shiils dan Blane— Philip G. Altbach melihat kemunculan gerakan mahasiswa di negara-negara industri maju, Eropa Barat dan Amerika Utara justru dipicu oleh keadaan masyarakat yang sudah makmur dan sistem masyarakat yang sudah mantap. Tekanan sistem yang sedemikian ketat dan kemakmuran merupakan penyebab munculnya gerakan mahasiswa. Protes mahasiswa muncul karena sistem yang sedemikian ketat dan kemakmuran yang telah menyediakan semuanya tidak lagi memberinya kesempatan untuk menunjukkan prestasinya. Dengan lain perkataan bahwa mahasiswa melakukan protes selain untuk membebaskan diri dari sistem yang menekannya dan kemajuan yang menghilangkan eksklusifitasnya, juga untuk menunjukkan prestasinya.

Dengan demikian secara akademik studi ini bukanlah studi pertama yang mengkaji mengenai gerakan mahasiswa di negara berkembang, namun merupakan studi pertama yang mengkaji secara khusus dan dalam yang berbentuk disertasi mengenai kepentingan politik dan ideologi aktivis mahasiswa dan elit politik dalam gerakan politik mahasiswa sebagai penyebab terjadinya polarisasi gerakan mahasiswa yang menggunakan pendekatan politik dan ideologi, sehingga berbeda dengan studi atau kajian-kajian sebelumnya. Studi yang mengambil kasus polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan pada masa Abdurrahman Wahid adalah untuk menjelaskan “perkawinan” kepentingan politik dan kepentingan ideologi dari aktivis mahasiswa dan elit politik sebagai penyebab terjadinya polarisasi di tubuh gerakan mahasiswa. Meskipun demikian studi ini tetap mendukung studi-studi sebelumnya terutama yang berkaitan dengan studi gerakan mahasiswa yang menggunakan pendekatan ideologi, kepentingan politik, sosialisasi politik dan partisipasi politik, serta peran mahasiswa dalam perubahan sosial dan politik.

### **1.6. Kerangka Pemikiran**

Dalam mengkaji polarisasi gerakan mahasiswa digunakan kerangka pemikiran yang dibangun dari teori atau konsep-konsep yang telah disesuaikan dengan realitas atau konteks Indonesia. Adapun teori atau konsep yang digunakan dalam studi ini, yaitu: (1) teori demokrasi dari Maswadi Rauf,

**Universitas Indonesia**

Larry Diamond, Juan J. Linz dan Alfred Stepan untuk menjelaskan kemunculan gerakan HMI dan KAMMI yang mendukung B.J. Habibie, gerakan FORKOT dan FKSMJ yang menentang B.J. Habibie, BEMI yang mendukung Abdurrahman Wahid dan BEMSI yang menentang Abdurrahman Wahid sebagai wujud dari kebebasan berbicara dan berserikat atau berkumpul yang menjadi inti dari demokrasi. Selain itu teori demokratisasi juga digunakan untuk melakukan analisa terhadap potret polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Sedangkan teori konflik dari Maswadi Rauf digunakan untuk menjelaskan konflik antara polarisasi gerakan mahasiswa; HMI dan KAMMI yang mendukung B.J. Habibie, FORKOT dan FKSMJ yang menentang B.J. Habibie, BEMI yang mendukung Abdurrahman Wahid dan BEMSI yang menentang Abdurrahman Wahid yang disebabkan oleh adanya faktor obyektif dan faktor subyektif; (2) tipologi gerakan politik mahasiswa dari studi Philip G. Altbach, Arbi Sanit, Suwondo dan Muridan S. Widjojo untuk menjelaskan gerakan HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI dalam mendukung dan menentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid; (3) teori elit politik dari Suzanne Keller untuk menjelaskan keterlibatan elit-elit politik yang secara personal dalam mendukung aksi-aksi HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI dalam mendukung dan menentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid.

#### **a. Demokrasi dan Demokratisasi**

Demokrasi mencakup konsep kebebasan dan persamaan serta kedaulatan rakyat. Sedangkan konsep kebebasan dan persamaan serta kedaulatan rakyat menurut Maswadi Rauf didalamnya terdapat persyaratan-persyaratan demokrasi antara lain: (1) kebebasan berbicara dan berkumpul; (2) pemilu yang bebas, terbuka, adil, jujur, berskala dan kompetitif; (3) pemerintah yang tergantung pada parlemen.<sup>71</sup> Senada dengan Maswadi Rauf, Larry Diamond mengemukakan bahwa demokrasi merupakan sistem yang mengakui kebebasan berbicara, pers, berserikat dan majelis sebagai kebutuhan minimum dalam tatanan di mana

<sup>71</sup> Maswadi Rauf, *“Teori Demokrasi dan Demokratisasi”*, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fisip UI, Jakarta: UI Salemba, 1997, hal. 5

terdapat kompetisi dan partisipasi secara bermakna.<sup>72</sup> Sementara pendapat yang cenderung pragmatis datang dari Juan J. Linz dan Alfred Stepan. Linz dan Stepan mengatakan:

“Kebebasan hukum untuk merumuskan dan mendukung alternatif-alternatif politik dengan hak yang sesuai untuk bebas berserikat, bebas berbicara dan kebebasan-kebebasan dasar lain bagi setiap orang, persaingan yang bebas dan anti kekerasan di antara pemimpin dengan keabsahan periodik bagi mereka untuk memegang pemerintahan, dimasukkannya seluruh jabatan politik yang efektif di dalam proses demokrasi, dan hak untuk berperan serta bagi semua anggota masyarakat politik, apapun pilihan politik mereka.<sup>73</sup>

Dari ketiga pendapat ahli tersebut dapat ditegaskan kembali bahwa demokrasi merupakan mekanisme politik yang tidak hanya memberi kebebasan kepada setiap orang untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan politik, tetapi juga sistem yang memberi tugas kepada pemerintah untuk menjamin dan melindungi setiap orang yang ingin menggunakan kebebasannya untuk berbicara dan berserikat, serta mengusulkan atau menolak seseorang untuk suatu jabatan politik (liberalisasi politik). Hal itu sejalan dengan pandangan Schumpeter tentang demokrasi yang disebutnya sebagai “teori lain mengenai demokrasi”. Menurut Schumpeter “teori lain mengenai demokrasi” adalah suatu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.<sup>74</sup>

Dalam sistem demokrasi, keputusan politik yang dibuat melalui prosedur kelembagaan dilakukan melalui perjuangan kompetitif, sehingga suara rakyat sangat penting sebagai dasar legitimasinya. Orang-orang yang terlibat dalam prosedur itu berkompetisi merebut simpati dan dukungan rakyat untuk mendapatkan legitimasi politik dari keputusan politik yang diperjuangkan dan diputuskannya. Dengan kata lain suara rakyat penting bagi orang-orang yang terlibat dalam prosedur itu bukan hanya sebagai syarat bagi sebuah keputusan

---

<sup>72</sup> Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1999, hal. 8.

<sup>73</sup> Juan Linz dan Alfred Stepan, *Defining and Crafting Democratic Transition, Constitutions and Consolidation*, dalam Juan J. Linz (at al.), *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Belajar Dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*, Bandung: Mizan, 2001, hal. 26-27.

<sup>74</sup> David Beetham dan Kevin Boyle, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, Yogyakarta: Kanisius, 2000, hal. 5.

yang kompetitif, tetapi juga sebagai dasar argumen untuk menyerang dan menolak alternatif keputusan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu demokrasi dalam konteks keputusan politik yang kompetitif identik dengan konflik politik.

Jika demokrasi mencakup kebebasan atau persamaan dan kedaulatan rakyat (liberalisasi politik), maka demokratisasi bergerak dari struktur otoriter ke struktur demokrasi dengan prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu demokratisasi menurut Gerry van Klinken bergerak dari pembusukan sebuah rezim otoriter menuju pematangan melalui masa transisi dan konsolidasi.<sup>75</sup> Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa demokratisasi merupakan substansi demokrasi yang harus dilewati dengan transisi dan konsolidasi.

Dalam upaya menentang dan mendukung Abdurrahman Wahid para elit politik terutama elit partai politik melakukan kontak-kontak politik dengan para aktivis mahasiswa. Kontak-kontak politik antara para aktivis mahasiswa dan para elit politik yang dilakukan secara personal dapat dilihat sebagai bentuk sosialisasi politik. Menurut Gabriel Almond kontak-kontak politik langsung dengan tokoh-tokoh politik dan pemerintahan akan memainkan peranan penting dalam membentuk sikap dan keyakinan politik seseorang.<sup>76</sup> Kontak-kontak politik yang dilakukan oleh para elit politik pendukung dan penentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid adalah dimaksudkan untuk mengajak dan merangkul para aktivis mahasiswa yang memiliki tujuan politik yang sama.

Cara tersebut terlihat efektif karena selain mempermudah kedua belah pihak untuk menyusun dan menghitung kekuatan, juga untuk membantu memperkuat dan mempertajam tujuan politik masing-masing. Tujuan kontak-kontak politik bagi pendukung dan penentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid adalah untuk memperkuat sikap dan keyakinan dalam mendukung dan menentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid yang pada hakekatnya juga merupakan ciri dari demokrasi khususnya perbedaan pendapat.

Hal tersebut terkait dengan pandangan Samuel P. Huntington yang menegaskan bahwa demokrasi bisa berjalan dalam empat hal, yaitu: (1) dengan

---

<sup>75</sup> Gerry van Klinken, *"Bagaimana Sebuah Kesepakatan Demokrasi Tercapai"* dalam Arief Budiman (et.al), *Harapan dan Kecemasan: Menatap Arah Reformasi Indonesia*, Jakarta: BIGRAF Publishing, 2000, hal. 74.

<sup>76</sup> Gabriel Almond dalam Mas'ood dan Colin MacAndrew, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1982, hal. 35037.

cara transformasi di mana elit yang berkuasa memelopori proses perwujudan demokrasi; (2) dengan cara pergantian (*replacement*) di mana kelompok oposisi memelopori proses perwujudan demokrasi, dan rezim otoriter tumbang atau digulingkan; (3) dengan cara *transplacement* di mana proses demokratisasi merupakan hasil tindakan bersama kelompok pemerintah dan kelompok oposisi; dan (4) dengan cara intervensi yaitu proses demokratisasi akibat intervensi pihak luar atau asing dengan menjatuhkan rezim otoriter.<sup>77</sup>

Menurut Maswadi Rauf demokratisasi adalah suatu proses tanpa akhir karena negara demokratis tidak akan pernah dihasilkan sekali jadi, perlu proses yang panjang. Demokratisasi adalah proses yang tidak pernah selesai sampai kapanpun juga. Demokratisasi bertujuan untuk menegakkan semakin banyak nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik. Selanjutnya, Maswadi Rauf mengatakan bahwa demokratisasi berjalan melalui proses yang dicirikan, yaitu: (1) demokratisasi merupakan proses yang terus menerus, tidak pernah selesai; (2) demokratisasi berjalan secara evolusioner, bertahap dan perlahan-lahan, bukan cepat atau revolusioner; (3) demokratisasi berjalan melalui proses perubahan secara persuasif.<sup>78</sup>

Demokratisasi berjalan dalam beberapa tahapan, diantaranya yaitu: tahap transisi dan tahap liberalisasi awal. Pada tahap transisi telah berlangsung pemerintahan dengan pemimpin baru yang berkerja atas dasar legitimasi yang baru. Namun tahap ini dapat terjadi kombinasi di antara beberapa hal, yaitu: (1) kritisisme dan perlawanan dari luar rezim; (2) rezim mengalami perpecahan internal; (3) angkatan bersenjata mengalami perpecahan atau perubahan orientasi politik; (4) rezim menghadapi krisis ekonomi dan atau politik yang semakin sulit dikelola; dan (5) tuntutan-tuntutan perubahan semakin kuat.

Sedangkan pada tahap liberalisasi awal yang terjadi adalah: (1) jatuh atau berubahnya rezim lama; (2) meluasnya hak-hak politik rakyat; (3) terjadinya ketidaktertataan pemerintahan; (4) terbentuknya ketidakpastian dalam banyak hal; (5) terjadinya ledakan partisipasi politik, (6) dilaksanakannya pemilihan umum

<sup>77</sup> Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti Pers, 1995, hal.146.

<sup>78</sup> Maswadi Rauf, "Demokrasi dan Demokratisasi: Penjajakan Teoritis Untuk Indonesia", dalam *Menimbang Masa Depan Orde Baru*, Seri Penerbitan Studi Politik, Jakarta: Lab Politik FISIP UI-Mizan, 1998, hal, 24-25.

yang demokratis; dan (7) pergantian pemerintahan sebagai konsekuensi dari hasil pemilihan umum. Biasanya pendekatan yang digunakan berpusat pada pendapat bahwa jalan menuju demokrasi berangkat dari aksi kolektif gerakan sosial dalam arena masyarakat sipil. Dalam konteks inilah, Sidney Tarrow melihat bahwa mobilisasi aksi kolektif massa merupakan kekuatan utama dalam episode demokratisasi.<sup>79</sup>

Menurut Sidney Tarrow jalan menuju demokrasi dapat dilihat dari lingkaran mobilisasi dan interaksi strategis antara elit dan massa. Bergeraknya massa ini karena ada “struktur kesempatan” (perang, tekanan internasional, perubahan ekonomi, krisis rezim, ketidakpuasan massa, dan sebagainya) yang mendorong untuk melawan rezim yang berkuasa. Tahapan-tahapan itu tidak selalu berlangsung mulus. Dalam banyak kasus ada negara yang bisa melewati transisi dengan baik, namun ada pula yang gagal setelah liberalisasi politik awal. Ada negara yang berhasil dalam tahapan liberalisasi politik awal, namun gagal menjalani transisi dan akhirnya kembali ke sistem lama yang otoriter. Juga ada negara yang berhasil menjalani transisi, tetapi gagal dalam menjalani konsolidasi demokrasi.

Dalam konteks tersebut ada tiga jenis interaksi yang menentukan dalam proses demokratisasi, yaitu: (1) interaksi antara pemerintah dengan kelompok oposisi; (2) interaksi antara kelompok pembaharu dengan kelompok konservatif dan pemerintah koalisi; (3) interaksi antara kelompok moderat dengan kelompok ekstrim di dalam kelompok oposisi. Menurut Huntington, ketiga interaksi utama ini memainkan peran tertentu dalam semua jenis transisi: apakah itu transformasi, *replacement* maupun *transplacement*.<sup>80</sup>

Dalam transformasi, interaksi antara kelompok pembaharu dengan kelompok konservatif dalam pemerintah koalisi merupakan interaksi yang terpenting; dan transformasi hanya terjadi jika kelompok pembaharu lebih kuat daripada kelompok konservatif. Ketika transformasi berlangsung, kelompok moderat yang berposisi sering dikooptasi ke dalam koalisi yang berkuasa.

---

<sup>79</sup> Sidney Tarrow, “*Mass Mobilization and Regime Change*”, dalam Richard Gunther, P. Nikiforos D, dan Hans Jurgens Puhle (eds.), *The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective*, Baltimore: The John Hopkins University Press, 1995.

<sup>80</sup> Huntington, *op.cit.*, hal. 158.

Sementara kelompok konservatif yang menentang demokratisasi keluar dari koalisi. Sedangkan dalam *replacement*, interaksi antara pemerintah dengan kelompok oposisi serta interaksi antara kelompok moderat dengan kelompok ekstrim berperan penting; kelompok oposisi pada akhirnya harus lebih kuat daripada pemerintah, dan kelompok moderat harus lebih kuat daripada kelompok ekstrim. Dalam *transplacement*, interaksi utama adalah interaksi antara kelompok pembaharu dengan kelompok moderat yang perbedaan kekuatannya tidak begitu timpang dan masing-masing kelompok mampu mendominasi kelompok anti demokrasi yang berada pada masing-masing di garis pemisah antara pemerintah dengan pihak oposisi.

Indonesia sepeninggal Soeharto, bila mengikuti teoritis yang dikemukakan oleh O'Donnell dan Schmitter, baru memasuki fase "liberalisasi politik awal". Fase ini secara teoritis sebagai fase "transisi dari otoritarianisme menuju ke sistem yang tidak pasti. Menurut O'Donnell dan Schmitter, transisi adalah interval antara suatu rezim politik dan rezim yang lain.<sup>81</sup> Transisi yang dimaksud O'Donnell dan Schmitter adalah suatu fase dimulai proses perpecahan sebuah rezim otoritarian dan pengesahan beberapa bentuk demokrasi; atau kembalinya beberapa bentuk pemerintahan otoriter atau kemunculan suatu aktor revolusioner. Ciri tipikal yang menandai fase transisi menurut O'Donnell dan Schmitter adalah ketika para penguasa otoriter, demi alasan apapun, memulai memodifikasi peraturan-peraturan mereka sendiri sebagai jaminan yang lebih kuat bagi hak-hak individu dan kelompok.<sup>82</sup>

Sedangkan liberalisasi adalah proses pendefinisian ulang dan perluasan hak-hak. Liberalisasi merupakan proses mengefektifkan hak-hak yang melindungi individu dan kelompok-kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara atau pihak ketiga. Pada tingkat individu, perlindungan itu meliputi hak diperiksa di pengadilan, privasi dalam rumah, berkorespondensi, hak dibela di pengadilan, kebebasan untuk mengadakan gerakan, hak berbicara dan mengeluarkan petisi. Sedang pada tingkat kelompok meliputi hak untuk bebas dari hukuman yang dijatuhkan karena mengekspresikan ketidaksepakatan secara

---

<sup>81</sup> O'Donnell dan Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, Jakarta: LP3ES, 1993, hal. 7.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal. 7.

kolektif terhadap kebijakan pemerintah, bebas dari sensor terhadap berbagai cara berkomunikasi, kebebasan membentuk kelompok secara sukarela, dan lain-lain.<sup>83</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat pula ditegaskan bahwa demokrasi dan demokratisasi secara implisit dan ekspilisit berkaitan dengan konflik politik. Konflik politik menurut Maswadi Rauf konflik adalah setiap perbedaan pendapat antara paling tidak dua orang atau kelompok, sedangkan konflik politik adalah konflik yang memiliki keterkaitan dengan pejabat politik atau pejabat pemerintahan dan kebijakan, serta sifatnya yang mengarah kepada konflik kelompok.<sup>84</sup>

Konflik politik terjadi bila kelompok-kelompok yang berbeda terdapat pertentangan dalam pencapaian kepentingannya. Akan tetapi menurut Johan Galtung, semua konflik memiliki tiga komponen utama, yaitu (1) kontradiksi, yaitu pertentangan dari pihak-pihak yang berkonflik atau bertikai, (2) sikap, yaitu unsur subyektif dari pihak-pihak yang bertikai, dan (3) prilaku, yaitu unsur obyektif dari kontradiksi.<sup>85</sup> Dalam konflik politik isu yang dipertentangkan adalah isu publik sehingga mempertegas kalau konflik tersebut terbentuk karena adanya penguasa politik. Konflik politik timbul karena adanya kelangkaan sumber daya dan posisi (*resources and positions scarcity*). Semakin besar penderitaan dan kekecewaan rakyat, maka semakin besar pula dorongan di dalam masyarakat untuk berkonflik dengan penguasa politik. Namun dalam konteks konflik politik, menurut Albert F. Eldridge pihak-pihak yang terlibat konflik berpusat pada saling hubungan antara kekuasaan (*power*), pengaruh (*influence*) dan kewenangan.<sup>86</sup>

Oleh sebab itu kata Maswadi Rauf konflik tidak mungkin dihapuskan dan dipertahankan secara terus menerus karena sudah merupakan gejala sosial. Sebagai gejala sosial, konflik ada karena masyarakat ada, sehingga selama masyarakat ada maka selama itu pula ada konflik. Akan tetapi tidak berarti konflik politik tidak bisa diselesaikan. Menurut Maswadi Rauf penyelesaian konflik dapat melalui dua cara, yaitu (1) cara persuasif (*persuasive*) dan, (2) dan kekerasan

<sup>83</sup> *Ibid.*, hal. 7-8.

<sup>84</sup> Lihat Maswadi Rauf, *Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*, Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas, 2000, hal. 2.

<sup>85</sup> Lihat Johan Galtung dalam Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hal. 20-21.

<sup>86</sup> Albert F. Eldridge, *Images of Conflict*, New York: St. Martin's Press, 1979, hal. 5.

(*coercive*). Cara pertama akan menghasilkan penyelesaian konflik secara tuntas, sedangkan cara kedua, meskipun cepat dan mudah tetapi tidak dapat menghasilkan penyelesaian konflik secara tuntas.

Konflik berakhir secara tuntas bila pihak-pihak yang berkonflik berhasil mencapai titik temu dari perbedaan. Menurut Maswadi Rauf titik temu dari perbedaan itulah yang kemudian disebut konsensus atau kompromi, dimana hal itu bisa dicapai hanya melalui dua cara, yaitu (1) tanpa perantara, dan (2) dengan perantara (*mediator*). Selanjutnya, kedua cara ini akan bermuara ke salah satu dari empat model konsensus yang ada, yaitu (1) konsensus “model pendapat internal”, (2) “model pendapat dominan”, (3) konsensus “model pendapat luar”; (4) konsensus “model gabungan”.

Model pertama tampak gabungan dari butir-butir pendapat dari pihak-pihak yang berkonflik, semua butir-butir yang tidak disepakati oleh pihak yang berkonflik semuanya disepakati untuk dibuang. Pada model kedua tampak pendapat dari salah satu pihak yang berkonflik disepakati untuk dijadikan konsensus oleh pihak lainnya, sedangkan pada model ketiga tampak semua pendapat dari pihak yang berkonflik disepakati untuk dibuang lalu diganti dengan pendapat pihak luar untuk dijadikan konsensus oleh pihak-pihak yang berkonflik. Sedangkan pada model keempat tampak gabungan antara pendapat dari salah satu pihak yang berkonflik dan pendapat dari pihak luar.

Selain keempat model itu, Maswadi Rauf mengajukan konsensus model pengadilan yang juga dapat dipakai bila keempat model tersebut gagal dilaksanakan. Akan tetap model terakhir ini menurut Maswadi Rauf tidak didasarkan pada perubahan pendapat dari pihak-pihak yang berkonflik, melainkan melalui wewenang pemerintah yang diatur sesuai hukum yang berlaku. Kedua belah pihak yang terlibat konflik harus menerima pendapat luar, yaitu keputusan pengadilan untuk mengakhiri konflik terlepas siapa yang diuntungkan.

## **b. Gerakan Mahasiswa**

Dalam terminologi ilmu politik, partisipasi politik non-konvensional adalah partisipasi dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, gerakan massa, kudeta, revolusi dan pembunuhan politik. Sebagai bentuk partisipasi politik, gerakan massa mahasiswa bertujuan untuk mempengaruhi atau mengubah kebijakan atau

kondisi politik yang ada sesuai dengan keinginannya. Dengan kata lain, gerakan massa mahasiswa adalah suatu aktivitas yang ditujukan untuk merubah tatanan kehidupan masyarakat. Menurut Gabriel Almond unjuk rasa atau gerakan massa merupakan bagian dari partisipasi politik, yaitu bentuk partisipasi politik non-konvensional.<sup>87</sup>

Ciri gerakan massa menurut Eric Hoffer, yaitu: (1) kebangkitan dan kerelaan para anggotanya untuk berkorban sampai mati; (2) kecenderungan untuk beraksi secara kompak; (3) memiliki fanatisme; (4) antusiasme; (5) harapan berapi-api; (6) kebencian; (7) intoleransi; (8) kepercayaan buta; (9) kesetiaan tunggal.<sup>88</sup> Bagi Eric Hoffer semua gerakan massa, betapa pun berbeda dalam doktrin dan aspirasinya, tetap terdiri atas manusia-manusia yang kecewa dan tidak puas atau frustrasi. Sedangkan bila dilihat dari sifatnya, ada dua tipe gerakan, yaitu: (1) gerakan sebagai suatu reaksi spontan; sebab-sebab yang tidak begitu jelas, menggunakan jaringan yang tidak begitu tertata, dan respon terhadap suatu keadaan tertentu; (2) gerakan sebagai langkah-langkah terorganisir dengan tujuan, strategi dan cara-cara yang dirumuskan secara jelas, sadar dan didasarkan kepada suatu analisis yang kuat (Lihat Tabel 1.3).<sup>89</sup>

**Tabel 1. 3:**  
**Tipe Gerakan Mahasiswa**

No.	Kategori	Tipe 1	Tipe 2
1.	Bentuk/Sifat	Spontan/Emosional, Tidak terorganisir	Terencana/Kalkulasi/Terorganisasi
2.	Tujuan/Sifat Tujuan	Mempertahankan/Memperbaiki/ bukan perubahan mendasar	Mengubah secara mendasar/ dengan analisis sosial

**Sumber:** Diolah dari Timur Mahardika, *Gerakan Massa: Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan Secara Damai*, Yogyakarta; Laper Pustaka Utama, 2000, hal. 15-16.

<sup>87</sup> Gabriel Almond membagi partisipasi politik ke dalam dua bentuk, yaitu: (1) bentuk konvensional; (2) bentuk non-konvensional. Partisipasi politik konvensional antara lain partisipasi politik dalam bentuk ikut dalam organisasi partai politik, menghadiri kampanye, memilih dalam pemilu, kontak pribadi secara langsung dan lobby politik. Sedangkan partisipasi politik non-konvensional adalah partisipasi dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, gerakan massa, kudeta, revolusi dan pembunuhan politik. Lihat Gabriel Almond, “*Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik*”, dalam Mochtar Ma’oed dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.

<sup>88</sup> Lihat Hoffer, *Gerakan Massa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.

<sup>89</sup> Timur Mahardika, *Gerakan Massa: Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan Secara Damai*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2000, hal. 15-16.

Gerakan mahasiswa merupakan bagian dari gerakan sosial yang didefinisikan Nan Lin sebagai upaya kolektif untuk memajukan atau melawan perubahan dalam sebuah masyarakat atau kelompok.<sup>90</sup> Rudolf Heberle menyebutkan bahwa gerakan sosial merujuk pada berbagai ragam usaha kolektif untuk mengadakan perubahan tertentu pada lembaga-lembaga sosial atau menciptakan orde baru.<sup>91</sup> Bahkan Eric Hoffer menilai bahwa gerakan sosial bertujuan untuk mengadakan perubahan.<sup>92</sup> Teori awal menyebutkan, sebuah gerakan muncul ketika masyarakat menghadapi hambatan struktural karena perubahan sosial yang cepat seperti disebutkan Smelser.<sup>93</sup> Teori kemacetan ini berpendapat bahwa “pengaturan bagi struktural dalam masyarakat seperti urbanisasi dan industrialisasi menyebabkan hilangnya kontrol sosial dan meningkatkan “gelombang menuju perilaku antisosial”.<sup>94</sup>

Dalam mewujudkan fungsi sebagai kaum intelektual itu mahasiswa memainkan peran sosial mulai dari pemikir, pemimpin dan pelaksana. Sebagai pemikir mahasiswa mencoba menyusun dan menawarkan gagasan tentang arah dan pengembangan masyarakat. Peran kepemimpinan dilakukan dengan aktivitas dalam mendorong dan menggerakkan masyarakat. Sedangkan keterlibatan mereka dalam aksi sosial, budaya dan politik di sepanjang sejarah merupakan perwujudan dari peran pelaksanaan tersebut. Upaya mahasiswa membangun organisasi sebagai alat bagi pelaksanaan fungsi intelektual dan peran tidak lepas dari kezasannya.

Motif mahasiswa membangun organisasi adalah untuk membangun dan memperlihatkan identitas mereka didalam merealisasikan peran-peran dalam masyarakatnya. Bahkan mereka membangun organisasi karena yakin akan kemampuan lembaga masyarakat tersebut sebagai alat perjuangan. Bentuk-bentuk gerakan mahasiswa mulai dari aktivitas intelektual yang kritis melalui seminar, diskusi dan penelitian merupakan bentuk aktualisasi. Selain kegiatan ilmiah, gerakan mahasiswa juga menyuarakan sikap moralnya dalam bentuk petisi,

---

<sup>90</sup> Lihat Nan Lin, “*Social Movement*” dalam *Encyclopedia of Sociology*. New York: MacMillan Publishing Company, 1992, hal. 1880.

<sup>91</sup> Lihat Asep Setiawan dalam *Diktat Gerakan Sosial*, Jakarta: Jurusan Ilmu Politik, FISIP UMI, 1998, hal.10.

<sup>92</sup> Lihat Hoffer, *Op.Cit.*,

<sup>93</sup> Lihat Asep Setiawan, *Ibid.*,

<sup>94</sup> Lihat Asep Setiawan, *Ibid.*,

pernyataan dan suara protes. Bentuk-bentuk konservatif ini kemudian berkembang menjadi radikalisme yang dimulai dari aksi demonstrasi di dalam kampus. Secara perlahan karena perkembangan di lapangan dan keberanian mahasiswa maka aksi protes dilanjutkan dengan turun ke jalan-jalan. Bentuk lain dari aktualisasi peran gerakan mahasiswa ini dilakukan dengan menurunkan massa mahasiswa dalam jumlah besar dan serentak. Kemudian mahasiswa ini mendorong desakan reformasi politiknya melakukan pendudukan atas bangunan pemerintah dan menyerukan pemboikotan. Untuk mencapai cita-cita moral politik mahasiswa ini maka muncul berbagai bentuk aksi seperti umumnya terjadi dalam gerakan sosial.

Berkaitan dengan peran gerakan mahasiswa yang dilakukan dengan menurunkan massa mahasiswa dalam jumlah besar dan serentak untuk mendukung B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid, Iwan Gardono Sujatmiko melihat dukungan itu sebagai bagian dari bentuk legitimasi melalui mobilisasi massa. Sebab, legitimasi menurut Iwan Gardono Sujatmiko memiliki dua bentuk, yaitu: (1) melalui pemilihan umum; (2) melalui mobilisasi massa.<sup>95</sup> Bentuk mobilisasi massa berlangsung pada masa pemerintahan dimana mobilisasi massa secara demonstratif (*peoples power*) terlihat mendukung atau menolak seorang pemimpin atau pemerintah.

Menurut Suwondo secara garis besar ada dua pendekatan untuk memahami gerakan mahasiswa, yaitu:<sup>96</sup> (1) pendekatan kultural; (2) pendekatan struktural. Pendekatan kultural melihat bahwa munculnya gerakan mahasiswa berkaitan dengan perubahan sosial akibat modernisasi di mana dalam perubahan tersebut terjadi transfer nilai-nilai politik, pengetahuan dan sikap politik akibat adanya sosialisasi politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan pendekatan struktural yang melihat gerakan mahasiswa sebagai reaksi terhadap kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Adanya kondisi tersebut menyebabkan mahasiswa melakukan gerakan menuntut perubahan agar kesenjangan tersebut berubah menjadi adil dan sejahtera.

---

<sup>95</sup> Lihat Iwan Gardono Sujatmiko, *Dampak Reformasi*, dalam Selo Soemardjan, *Kisah Perjuangan Reformasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hal. 261-266.

<sup>96</sup> Suwondo, *Gerakan Mahasiswa Bandar Lampung: Tinjauan Dalam Dimensi Budaya Politik: Ringkasan Disertasi*, Jakarta: Pascasarjana Ilmu Politik UI, 2002, hal. 12.

Gerakan mahasiswa kerap disebut juga sebagai gerakan moral (*moral movement*). Sebagai gerakan moral, apa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam gerakan adalah dalam upaya menyuarakan tentang kebenaran universal, menolak segala bentuk pelanggaran HAM, penindasan, kesewenang-wenangan, kedzaliman dan otoritarianisme kekuasaan. Gerakan moral adalah statemen politik yang bersisi kekuatan moral (*moral force*). Selain gerakan moral, gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa juga ada yang bersifat politis, sehingga kemudian disebut sebagai gerakan politik. Gerakan mahasiswa disebut sebagai gerakan politik karena tujuan dari gerakannya berkaitan dengan kepentingan politik dan ideologi. Menurut Suwondo ada dua model dari gerakan mahasiswa, yaitu: (1) gerakan mahasiswa yang berorientasi pada norma. Model ini memperlihatkan gerakan mahasiswa bersifat koreksi terhadap kebijakan-kebijakan tertentu yang dianggap bermasalah; (2) gerakan mahasiswa yang berorientasi pada nilai. Model ini memperlihatkan gerakan mahasiswa yang ditujukan karena sebuah perjuangan ideologi.<sup>97</sup>

Pada prinsipnya gerakan mahasiswa dalam orientasinya yang ingin melakukan perubahan selalu menggunakan ukuran perubahan struktur atau lebih spesifik perubahan kebijakan sebagai ukuran keberhasilannya.<sup>98</sup> Fenomena tentang perubahan struktur atau perubahan kebijakan yang terjadi di Indonesia selalu dihasilkan dari proses gerakan politik bukan gerakan moral. Sementara, stigma gerakan moral mahasiswa tidak lain adalah bentuk justifikasi dari kebenaran akademis yang kelahirannya dilatarbelakangi karena independensi perguruan tinggi, yang berimplikasi pada cara pandang bahwa gerakan mahasiswa adalah gerakan yang masih murni dan independen yang sangat jauh dari kepentingan pragmatis gerakan mahasiswa dan kepentingan politik tertentu.

<sup>97</sup> Suwondo, *Ibid.*, hal. 19-20.

<sup>98</sup> Ali Ansori melihat gerakan mahasiswa tidak pernah menggunakan gerakan moral sebagai pilihan bentuk aktualisasinya, tetapi yang dilakukannya adalah gerakan politik. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu: (1) gerakan mahasiswa dalam orientasinya yang ingin melakukan perubahan; (2) stigma gerakan moral mahasiswa tidak lain adalah bentuk justifikasi dari kebenaran akademis; (3) gerakan mahasiswa yang mengklaim dirinya menyuarakan aspirasi rakyat dengan menggunakan idiom demokrasi, HAM, supremasi sipil, supremasi hukum dan yang lainnya; (4) moral dalam gerakan mahasiswa sebenarnya hanya menyentuh pada aspek psikologi, emosional dan romantisme, bukan moral yang menjadi élan dan substansi dari gerakan. Lihat Ali Ansori, "*Refleksi Gerakan Mahasiswa*", dalam <http://anshori.wordpress.com/2007/10/04/refleksi-gerakan-moral-mahasiswa>. Di akses 11 Juni 2009.

Padahal realitas empiriknya gerakan mahasiswa banyak mendapatkan donor dari partai politik, pemerintah, *founding* internasional dan lain-lain.

Namun konsepsi independensi juga mengandung komplikasi seperti gerakan mahasiswa pada masa Orde Baru yang diamati oleh Burhan D. Magenda. Burhan D. Magenda mencermati istilah “kekuatan moral” yang menunjukkan adanya gejala independensi yang makin tinggi dari gerakan mahasiswa yang diikuti oleh proses demokratisasi khususnya dalam pemilihan dewan-dewan mahasiswa. Burhan D. Magenda melihat bahwa sentralisasi kekuasaan pada masa Orde Baru justru membuat gerakan mahasiswa menjadi “*the only effective opposition*” dalam masyarakat. Konflikasi itu adalah renggangnya hubungan antara gerakan mahasiswa intra-universiter di dalam kampus dengan ormas mahasiswa ekstra-universiter di luar kampus yang berlangsung pada periode pasca tahun 1970-an akibat independensi yang makin tinggi dari gerakan mahasiswa.

Oleh karena itu Burhan D. Magenda melihat istilah “kekuatan moral” mengandung ambivalensi. Secara politik istilah “kekuatan moral” menurut Burhan D. Magenda hanya menjadikan gerakan mahasiswa sebagai “pelopor tanpa pengikut”. Bagaimanapun juga, tegas Burhan D. Magenda, istilah “kekuatan moral” adalah gerakan mahasiswa yang hanya terpusat di kampus dan tidak memiliki ikatan organisatoris dengan kekuatan sosial politik di luarnya. Di satu sisi gerakan mahasiswa dengan “kekuatan moral” dapat mendengungkan etos egalitarian dan diorganisir secara romantik dengan *appeal* populis, tapi di lain sisi akan kehilangan dukungan lantaran pengertian independensi yang menutup pihak luar memberinya simpati dan dukungan.

Sedangkan gerakan mahasiswa yang mengklaim dirinya menyuarakan aspirasi rakyat dengan menggunakan idiom demokrasi, HAM, supremasi sipil, supremasi hukum dan yang lainnya, telah menjadikan idiom-idiom tersebut sebagai standar moral gerakan. Standar moral yang cenderung dikotomis karena pada realitasnya, moral kemudian menjadi alat untuk mengukuhkan eksistensi gerakan mahasiswa dan menyerang lawan (baca: negara) yang pada sisi lain negara yang dalam perwujudannya sebagai bentuk dari konsep *trias politica* (eksekutif, legislatif dan yudikatif) juga menggunakan idiom yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akan tetapi gerakan struktural negara dalam

konteks yang sama tidak disebut sebagai gerakan moral, dan hanya cenderung disebut gerakan politik yang identik dengan relasi kuasa.

Moral dalam gerakan mahasiswa sebenarnya hanya menyentuh pada aspek psikologi, emosional dan romantisme, bukan moral yang menjadi élan dan substansi dari gerakan, karena kebangkitan gerakan mahasiswa lebih signifikan dipengaruhi oleh faktor kepentingan politik dan ideologi pihak eksternal yang lebih massif. Misalnya, Badan Kerja Sama Pemuda-Militer (BKSPM) yang dibentuk pada tahun 1957 adalah bentuk infiltrasi politik ABRI. Begitu pula dengan gerakan mahasiswa tahun 1974/1975 yang melakukan pembakaran produk-produk Jepang di Indonesia, yang terkenal dengan Malari, sebenarnya hanyalah akibat dari pertarungan antara AS dan Jepang untuk memperebutkan pasar di Indonesia.

Peran mahasiswa sebagai gerakan moral dan gerakan massa untuk mendorong reformasi politik adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai kaum intelektual. Berbeda dengan gerakan revolusi yang mengejar perubahan struktural yang fundamental, gerakan reformasi seperti dikatakan Nan Lin berusaha memodifikasi hubungan struktural tanpa mengancam eksistensi insitusi.<sup>99</sup> Menurut Arbi Sanit ada dua tahap dalam reformasi politik, yaitu: (1) tahap transisi yang merupakan proses peralihan dari proses krisis politik ke proses normal kehidupan politik; (2) tahap reformasi normal dimana reformasi dilakukan dalam kerangka sistem politik yang ada.<sup>100</sup>

Pada tahap transisi, pemicu proses reformasi akan mengawali aktualisasinya. Ada lima kemungkinan peristiwa politik yang berpotensi menjadi pemicu yang akan mengawali berlangsungnya proses reformasi politik yaitu: (1) kudeta; (2) kesadaran penguasa; (3) tekanan publik opini kepada penguasa; (4) Presiden meninggal; (5) *people's power* yang aktif dan kuat. Sementara, tahap reformasi normal dimana reformasi dilakukan dalam kerangka sistem politik yang ada. Reformasi normal ini dilakukan melalui reformasi suprastruktur dan infrastruktur. Arbi Sanit menyebutkan, reformasi politik mahasiswa terfokus kepada sukseksi kepemimpinan, penegakan pemerintahan yang kuat-efektif sehingga produktif,

---

<sup>99</sup> Nan Lin, *Op.cit.*

<sup>100</sup> Arbi Sanit, *Reformasi Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hal.267.

penegakan pemerintahan yang bersih, penetapan kebijakan publik yang adil dan tepat dan demokratisasi politik.<sup>101</sup>

Muridan S. Widjojo telah merumuskan dengan baik mengenai gerakan mahasiswa 1998 dalam dua kelompok, yaitu "gerakan moral" dan "gerakan politik". Pembagian menjadi dua kelompok ini didasarkan pada wacana yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok dalam gerakan mahasiswa itu sendiri. Gerakan moral mengacu pada wacana yang dikembangkan oleh gerakan mahasiswa yang mengkritisi kebijakan rezim Orde Baru. Muridan S. Widjojo menyebut kelompok ini sebagai Gerakan Kritik Orde baru (GKOB). Sedangkan gerakan politik mengacu pada wacana untuk merobohkan rezim Orde Baru, dan menyebut kelompok ini sebagai Gerakan Anti Orde Baru (GAOB).<sup>102</sup>

Gerakan moral mendasarkan diri pada pandangan bahwa perubahan politik sudah cukup dilakukan dengan hanya "menghimbau" atau "mengingat" para elit politik. Berbeda dengan tujuan tipologi gerakan politik mahasiswa, gerakan moral mahasiswa tidak secara tegas ingin mengganti kekuasaan politik. Gerakan moral hanya menekankan pada aspek "suara" atau "gagasan" sebagai inti gerakan. Ini berarti bahwa kapasitas operasi yang diharapkan dari gerakan moral mahasiswa adalah sebatas "menghimbau" atau "mengingat" belaka. Para penganut paham ini sangat percaya bahwa suatu rezim politik bisa diubah dengan cara "dihimbau" atau "diingat" saja.<sup>103</sup>

Sedangkan gerakan politik secara tegas ingin mengganti kekuasaan rezim Orde Baru Soeharto. Kelompok ini menolak semua kerangka asumsi yang dibangun Orde Baru. Sebelum tahun 1997, pemerintah rezim Orde Baru telah melarang mahasiswa terjun ke gerakan politik karena hal tersebut bukan karakter mahasiswa. Menurut pemerintah Orde Baru, mahasiswa harus belajar dan menunjukkan prestasi di kampusnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa gerakan politik adalah hal yang tabu bagi mahasiswa saat itu. Akan tetapi tidak bagi kelompok GAOB. Mereka justru ingin menggunakan gerakan politik sebagai senjata untuk melawan pemerintah Orde Baru. Kelompok ini menyatakan bahwa mahasiswa tidak perlu menggunakan pemahaman yang dibuat oleh pemerintah

---

<sup>101</sup> Arbi Sanit, *Ibid.*, hal.267.

<sup>102</sup> Muridan S. Widjojo, *Op.cit*, hal. 234-289

<sup>103</sup> *Ibid.*, hal. 240.

Orde Baru, karena hal tersebut dapat membatasi peran gerakan mahasiswa itu sendiri. Dengan menganggap gerakan mahasiswa sebagai gerakan politik, maka ruang pergerakannya menjadi luas, sehingga dapat berjuang bersama-sama rakyat. Konsekuensi bagi suatu gerakan politik mahasiswa, yaitu menyatunya antara berbagai kekuatan, termasuk dengan rakyat. Kelompok ini secara tegas menginginkan adanya hubungan dengan massa pengikut di luar kampus.

Konsekuensi gerakan politik lainnya adalah terjadinya polarisasi atau perpecahan. Polarisasi gerakan mahasiswa disebabkan oleh dua perbedaan fundamental, yaitu: (1) kepentingan politik, dan (2) kepentingan ideologi. Berdasarkan hasil kajian Philip G. Altbach mengenai gerakan politik mahasiswa di negara-negara berkembang dan negara-negara maju selain faktor kepentingan politik, faktor ideologi juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap lahirnya gerakan yang mendukung atau menentang kekuasaan.<sup>104</sup> Arbi Sanit bahkan menegaskan bahwa gerakan politik mahasiswa akan terpecah apabila ketidakpuasan mahasiswa terjalin dengan keresahan masyarakat yang disusun berdasarkan ideologi.<sup>105</sup>

Jalanan ketidakpuasan mahasiswa yang disusun berdasarkan ideologi mendorong terjadinya perpecahan, karena ideologi akan bekerja menajamkan jalinan ketidakpuasan dan menawarkan alternatif penyelesaian. Potensi ideologi sebagai sumber perpecahan karena ideologi juga tumbuh dari kepentingan dan pemikiran manusia. Deliar Noer mengatakan:

“Ideologi mungkin sekali tumbuh dari kepentingan dan pemikiran manusia, bisa pula karena pengaruh agama. Pengaruh lingkungan dan tradisi serta pemikiran yang datang dari luar turut pula mewarnai ideologi itu. Malahan dalam soal agama, ajarannya sering dijabarkan sedemikian mungkin rupa sehingga ia merupakan ideologi. Tentu saja pemikiran yang tumbuh dari manusia serta pemikiran yang bersumber pada ajaran agama bisa pula bercampur.”<sup>106</sup>

Peran ideologi dalam mendorong terjadinya polarisasi karena ideologi akan melawan pandangan yang bertentangan dengannya dan berusaha

<sup>104</sup> Tentang gerakan politik mahasiswa lihat Philip G. Altbach, “*Students and Politics*” dalam Seymour Martin Lipset (ed.), “*Student and Politics*, New York-London: Basic Books, Inc., 1967. Lihat Arbi Sanit, “*Kata Pengantar: Politik Mahasiswa Di Antara Ideologi dan Institusionalisasi Politik Atau Kekuasaan*” dalam Philip G. Altbach (ed.), *Politik dan Mahasiswa Perspektif dan Kecenderungan Masa Kini*, Jakarta: PT. Gramedia, 1988, hal.xii.

<sup>105</sup> Lihat Arbi Sanit, *Op.Cit.*, hal.267.

<sup>106</sup> Deliar Noer, *Ideologi, Politik dan Pembangunan*, Jakarta: LPPM Tan Malaka, 2007, hal. 39.

mempertahankan, mengubah dan ataupun menghapuskan lembaga-lembaga sosial tertentu. Ideologi menurut Robert E. Lane merupakan suatu argumen, ia dimaksudkan sebagai pandangan yang mendorong dan melawan pandangan lain, ia pun meliputi program untuk mempertahankan, mengubah ataupun menghapuskan lembaga-lembaga sosial tertentu.<sup>107</sup>

Keberhasilan dan efektifitas gerakan mahasiswa menurut Orum sangat tergantung dari tiga faktor, yaitu: (1) organisasi, (2) doktrin atau ideologi gerakan, dan (3) aksi-aksi demonstrasi terhadap penguasa.<sup>108</sup> Doktrin atau ideologi dikatakan baik apabila memenuhi kriteria, antara lain: (1) dapat meningkatkan antusiasisme dan komitmen mendukung kegiatan politik; (2) dapat menciptakan kelompok yang lebih terorganisir; (3) dapat mengubah atau menguasai organisasi-organisasi yang ada.<sup>109</sup> Sementara organisasi mahasiswa dinilai sangat efektif dibanding organisasi lainnya dalam melakukan gerakan karena memiliki empat ciri, yaitu: (1) cenderung tertutup, (2) berbentuk faksi-faksi, (3) sentralisasi kekuasaan, dan (4) aksi-aksi gerakan dan strategi perjuangan yang harus dilakukan. Akan tetapi faktor lainnya yang juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan gerakan mahasiswa adalah aspek harapan dan ketidakpuasan individu mahasiswa terhadap kelompok yang ditentangnya yang dibangun oleh para politisi partai politik saat konsolidasi politik berlangsung.

### c. Elit Politik

Sejumlah besar studi tentang elit memusatkan perhatian pada peranan elit di negara-negara sedang membangun dan di negara maju. Peranan elit ternyata berbeda-beda. Dalam beberapa masyarakat tradisional, elit penguasa telah memberikan perlawanan yang kuat terhadap perubahan. Di negara yang

<sup>107</sup> Lihat Rober E. Lane, *Political Ideology Why the American Common Man Believes What He Does*, New York: Free Press, 1962. Lihat juga Rober E. Lane dalam Deliar Noer, *Op.Cit*, hal. 39. Penjelasan tentang ideologi politik lihat Bagus Takwin, *Akar-Akar Ideologi: Pengantar Kajian Konsep Ideologi Dari Plato Hingga Bourdieu*, Yogyakarta: Jalasutra, 2003, Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depan*, Yogyakarta: Qalam, 1993, Ahmad Suhelmi, *Islam dan Kiri: Respons Elit Politik Islam Terhadap Isu Kebangkitan Komunis Pasca-Soeharto*, Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2007.

<sup>108</sup> Orum, *Introduction to Political Sociology; The anatomy of The Body Politics*, New Jersey: Printice Hall, Inc, 1983, hal. 314-317.

<sup>109</sup> Simamora (ed), *Pembangunan Politik dalam Perspektif*, Jakarta: Bina Aksara 1985, hal. 229-231.

melaksanakan modernisasi, ditemukan elit tertentu yang sangat aktif memimpin pembangunan.

Dalam studi ini konsep elit politik yang digunakan adalah konsep elit politik dari Suzanne Keller untuk menjelaskan keterlibatan elit politik secara personal dalam lapangan politik, disamping konsep elit politik Gaetano Mosca untuk membantu menganalisis posisi elit politik dalam organisasi. Suzanne Keller menegaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat dan dalam tipe apapun pasti terdapat sekelompok kecil orang yang mampu mengendalikan masyarakat yang lainnya demi kepentingan kelompok kecil tersebut. Suzanne Keller menyebutkan bahwa minoritas yang berkuasa tersebut yang kemudian disebut dengan elit sangat berpengaruh terhadap kejadian-kejadian sosial yang terjadi pada masyarakat dan memerlukan sebuah penelitian untuk membuktikannya. Menurut Suzanne Keller pada perubahan sosial yang cepat peranan dari elit sangat besar sedangkan pada masa stabil para elit akan menyatu dengan zaman elit tersebut ada.<sup>110</sup>

Selanjutnya Suzanne Keller mengatakan bahwa tidak semua elit berperan dan mempunyai suatu dampak sosial yang umum dan bertahan, hanya kelompok-kelompok tertentu saja di mana keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya mempunyai akibat-akibat penting dan menentukan untuk kebanyakan anggota masyarakat. Kelompok-kelompok ini disebutnya sebagai elit penentu yang terdiri dari para pemimpin politik, ekonomi dan militer, para pemimpin moral (elit agama), budayawan (elit budaya), dan kaum intelektual (elit ilmiah).<sup>111</sup>

Jika menggunakan konsep Suzanne Keller maka elit politik yang dimaksud dalam studi ini adalah semua tokoh yang memiliki pengaruh politik baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Tokoh-tokoh itu dapat berasal dari organisasi formal, organisasi non-formal atau organisasi informal, seperti lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif, partai politik, media, *interest group* atau *civil society* dan tokoh masyarakat pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid.

---

<sup>110</sup> Lihat Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1995.

<sup>111</sup> *Ibid.*, hal. 28.

Meskipun demikian keputusan atau tindakan-tindakan dari kelompok-kelompok elit-elit politik itu tidak dapat dilepaskan dari posisi organisasionalnya masing-masing, sehingga juga tampak seolah-olah sebagai kelas politik. “Kelas politik” seperti yang dimaksud Gaetano Mosca terdiri dari: (1) personil politik, (2) kaum terpelajar, (3) intelektual kelompok yang berkuasa, (4) kelas menengah, dan (5) orang kaya pada umumnya.<sup>112</sup> Kelima unsur itu semuanya berada di lapisan atas dan disebut sebagai “kelas elit”. Sedangkan di bawahnya, yaitu pada lapisan menengah terdapat sub-elit yang disebut sebagai “kelas menengah baru” yang berfungsi sebagai penghubung antara “kelas elit” (lapisan atas) dan “kelas massa” (lapisan bawah). “Kelas menengah baru” itu terdiri dari (1) para pegawai negeri, (2) manajer dan pekerja kerah putih (3) ilmuwan dan insinyur yang fungsinya selain merupakan unsur penting pemerintahan masyarakat (kelas penguasa dalam arti luas), juga sebagai pemasok anggota-anggota baru kepada elit (kelas penguasa dalam arti sempit).

Mengacu pada penjelasan Gaetano Mosca, pengertian “kelas elit” dan atau “kelas politik” selain mencakup anggota-anggota pemerintahan dan pejabat tinggi, pemimpin militer, dan aristokrat yang berpengaruh, juga mencakup “elit tandingan” yang di dalamnya terdapat pemimpin partai yang berada di luar lembaga pemerintahan, wakil-wakil kelompok kepentingan sosial baru, kelompok-kelompok pengusaha dan intelektual yang aktif dalam politik. Meskipun dibatasi oleh: (1) aturan hukum sebagai pernyataan kesatuan moral masyarakat secara keseluruhan; (2) kekuatan-kekuatan sosial sebagai wakil berbagai kepentingan yang berbeda dalam masyarakat, semua elemen “kelas politik” secara posisional dapat berpengaruh secara langsung dan menggunakan kekuatan politik dalam mempengaruhi kebijakan baik terang-terangan maupun tersamar. Sehingga fenomena kelas politik selalu mencakup sejumlah kelompok yang terlibat dalam kerjasama, kompetisi dan konflik.

Namun dalam kaitannya dengan kepemilikan sumber-sumber kekuasaan terutama ekonomi, konsep “elit penguasa” yang pengertiannya sama dengan “kelas elit” dan “kelas politik” terlihat berbeda dengan pengertian “elit yang memerintah” dalam implementasinya. Sehingga jika “elit yang memerintah”

---

<sup>112</sup> Mosca dalam T.B. Bottomore, *Elite dan Masyarakat*, Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2006, hal. 4-20.

didefinisikan sebagai mereka yang menduduki posisi komando dalam suatu masyarakat, maka “elit penguasa” didefinisikan sebagai kelas yang memiliki instrumen-instrumen utama produksi ekonomi dalam masyarakat.<sup>113</sup> Bila yang pertama diasumsikan lebih kohesif lantaran sedikit dasar-dasar kekuasaan yang dimilikinya, maka yang kedua kohesif karena dasar dari kekuasaannya adalah dominasi ekonomi.

Tampak pula bahwa konsep “elit yang memerintah” mengkontraskan “minoritas terorganisir yang memerintah” (elit) dengan “mayoritas yang tidak terorganisir yang diperintah” (massa), sedangkan konsep “kelas yang berkuasa” (elit penguasa) mengkontraskan kelas dominan yang berkuasa dengan kelas tidak dominan yang dikuasai. Berbeda dengan anggota “elit yang memerintah”, anggota “elit penguasa” memiliki kepentingan-kepentingan ekonomi yang sama dan secara permanen terlibat dalam konflik dengan kelas-kelas lainnya yang menyebabkan kesadaran dan solidaritasnya berkembang secara terus menerus. Dimana komposisi ini akan terlihat jelas ketika sistem pemerintahan representatif dan sistem parlementer diberlakukan. Mosca mengatakan:

“Tidak dapat disangkal bahwa sistem [pemerintahan] representatif memberikan jalan bagi banyak kekuatan sosial yang berbeda untuk berpartisipasi dalam sistem politik dan, dengan demikian, untuk menyeimbangkan dan membatasi pengaruh kekuatan-kekuatan sosial lain dan khususnya pengaruh birokrasi”<sup>114</sup>

Oleh sebab itu meskipun Mosca sebelumnya menegaskan bahwa dalam sistem parlementer wakil tidak dipilih oleh para pemilih, tetapi sebagai suatu aturan, membuat dirinya dipilih oleh mereka. Akan tetapi Mosca pada akhirnya juga mengakui semua itu dengan mengatakan bahwa melalui wakil-wakilnya, mayoritas (massa) dapat saja atau mungkin memiliki kontrol tertentu terhadap kebijakan pemerintah.<sup>115</sup> Begitu juga dengan penjelasan H.D. Lasswell yang mengikuti kerangka Mosca. Menurut Lasswell:

“Elit politik terdiri dari para pemegang kekuasaan suatu lembaga politik. Para pemegang kekuasaan mencakup kepemimpinan dan formasi sosial yang biasanya merupakan asal-usul para pemimpin, dan kepadanya diberikan pertanggungjawaban, selama suatu jangka waktu tertentu.”<sup>116</sup>

<sup>113</sup> T.B. Bottomore, *Ibid.*, hal. 44.

<sup>114</sup> *Ibid.*, hal. 6.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hal. 6.

<sup>116</sup> H.D. Lasswell dalam T.B. Bottomore, *Ibid.*, hal. 10.

Jika menggunakan rumusan Harold D. Lasswell, Gabriel A. Almond<sup>117</sup> dan kriteria demokrasi Robert Dahl,<sup>118</sup> maka elit politik yang dimaksud dalam studi ini adalah kader-kader partai politik termasuk yang ada di DPR sebagai pejabat legislatif dan para Menteri di Kabinet Persatuan sebagai pejabat eksekutif untuk periode 1999-2004. Sebab, elit politik menurut Almond dan Dahl adalah selain dia pemimpin partai politik, ia juga pejabat tinggi di lingkungan legislatif dan eksekutif yang dipilih melalui pemilu. Dengan demikian baik Mosca dan Pereto, maupun Almond, Dahl dan Lasswell, pada prinsipnya sepakat bahwa dalam suatu masyarakat terutama masyarakat modern meskipun diatur oleh sebuah konstitusi yang demokratis tetap saja diperintah oleh “elit politik” sebagai pemerintah yang dapat dimintai pertanggungjawabannya oleh “massa” yang diperintah dengan perantara “kelas menengah”.

### 1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian studi ini meliputi lima aspek, yaitu: (1) pendekatan penelitian, (2) strategi penelitian, (3) tipe penelitian, (4) metode pengumpulan data, dan (5) teknik analisis data. Penjelasan kelima unsur tersebut, yaitu studi tentang gerakan politik mahasiswa dengan studi kasus polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Dedy Nur Hidayat fokus perhatian pendekatan kualitatif adalah pada realitas sosial yang selalu berubah dan merupakan hasil konstruksi sosial yang berlangsung antara para pelaku dan institusi sosial.<sup>119</sup> Pendekatan ini digunakan agar studi ini lebih terfokus dan dapat meliputi latar individu dan organisasi secara utuh.<sup>120</sup>

Studi ini menggunakan strategi penelitian studi kasus. Studi kasus menurut Denzin Guba adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau

---

<sup>117</sup> Robert Dahl memasukan para pejabat yang dipilih dan hak dipilih atau dicalonkan dalam pemilu sebagai salah satu dari tujuh lembaga demokrasi yang harus ada dalam proses demokrasi. Dalam Pemilu 1999 hanya anggota, kader atau pemimpin partai yang memiliki hak dipilih atau dicalonkan. Sehingga secara tidak langsung hanya para pemimpin atau kader partai politik yang dapat menjadi pejabat legislatif dan eksekutif. Lihat selengkapnya Robert Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jilid II, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992, hal, 17-21.

<sup>118</sup> Lihat Gabriel Almond dikutip dari catatan kaki nomor 1 Robert Dahl, *Ibid.*, hal. 2006.

<sup>119</sup> Lihat Dedy Nur Hidayat, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif; Kumpulan Bahan Kuliah*, Jakarta: Pascasarjana UI, 2001/2002, dan 2003.

<sup>120</sup> Lihat Bogdan dalam Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Karya, 1989, hal. 3.

menginterpretasikan suatu kasus.<sup>121</sup> Sementara menurut Robert K. Yin studi kasus dibutuhkan untuk melacak peristiwa-peristiwa kontemporer, terutama bila peristiwa-peristiwa yang relevan tak dapat dimanipulasi.<sup>122</sup>

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif artinya, mencari fakta lewat interpretasi yang tepat dengan maksud membatasi deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta, sifat-sifat serta relasi antar fenomena yang diselidiki.<sup>123</sup> Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>124</sup> Jenis penelitian ini menurut Sanapiah Faisal<sup>125</sup> dimaksudkan sebagai eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Studi ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Menurut Consuello Sevilla, tipe penelitian deskriptif selalu memberikan informasi mutakhir sehingga dapat menggambarkan dan mengidentifikasi sifat suatu keadaan yang sedang berlangsung, dan juga kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>126</sup> Oleh sebab itu peneliti melakukan tiga langkah penting, yaitu: (1) merumuskan kerangka konsep, (2) mengkategorikan dan mengorganisir hasil data berdasarkan rumusan konsep, (3) data yang sudah dikategorisasi dan diorganisir tadi berupa deskripsi lalu diinterpretasikan sesuai dengan kerangka konsep.<sup>127</sup>

<sup>121</sup> Agus Salim (peny.), *Teori dan Paradigma Sosial dari Denzin Guba dan Penerapannya*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001, hal. 43.

<sup>122</sup> Lihat Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hal 18.

<sup>123</sup> Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal. 63-64.

<sup>124</sup> Lihat Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990, hal. 3.

<sup>125</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asah Asuh, 1990, hal 20. Menurut Sanapiah Faisal penelitian kualitatif walaupun memiliki tradisi yang tidak tunggal, sesuai dengan keragaman teori dan akar tradisi masing-masing, kesemuanya bermuara kepada "alasan-alasan" (*reason*) yang tersembunyi di balik tindakan para pelaku tindakan sosial atau bermuara pada "makna sosial" dari suatu fenomena sosial. Lihat juga Sanapiah Faisal, *Varian-Varian Kontemporer Penelitian Sosial, Makalah Seminar dan Pelatihan Metodologi Penelitian Sosial bagi Dosen dan Ilmuwan Sosial*, Surabaya, 26-28 Januari 2001, hal. 4.

<sup>126</sup> Consuello Sevilla (et al.), *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press 1983, hal. 71-73.

<sup>127</sup> Dalam penelitian kualitatif dikenal dua pendekatan, yaitu etik dan emik. Pendekatan etik dalam penelitian kualitatif terdapat dalam paradigma *postpositivism* yang berasumsi bahwa antara peneliti dan yang diteliti terdapat jarak yang memungkinkan seseorang "memotretnya" lewat pengetahuan tertentu. Pendekatan emik dalam penelitian kualitatif terdapat dalam paradigma

Studi ini menggunakan dua alat pengumpulan data, yaitu: (1) wawancara mendalam (*in depth interview*); dan (2) studi pustaka. Narasumber yang diwawancarai terdiri aktor gerakan mahasiswa HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI, serta elit politik dan pengamat (Lihat Tabel 1.4). Sedangkan studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan dengan cara menganalisis dan menseleksi berbagai sumber tertulis dan dokumen terpercaya yang berhubungan dengan masalah penelitian, seperti hasil riset, artikel, surat kabar, majalah dan selebaran serta arsip-arsip atau dokumen-dokumen terkait dengan masalah penelitian.

Sementara narasumber dan informan kunci ditentukan secara cermat dan selektif berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1) kompetensinya dalam menjawab pertanyaan penelitian; (2) posisinya dalam organisasi; (3) pemahamannya terhadap masalah penelitian, (4) tingkat keterlibatannya dalam polarisasi gerakan mahasiswa dan aksi-aksi demonstrasi mendukung dan menentang Presiden B.J. Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid. Menurut Lexy Moleong dalam penelitian kualitatif peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, sehingga maksud sampling; teknik-teknik pemilihan informan ialah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (*constructions*).<sup>128</sup> Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampel*,<sup>129</sup> yaitu teknik sampling ini digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian.<sup>130</sup>

---

interpretativism yang mengasumsikan adanya dunia intersubjektif, di mana sains dapat mewakilinya lewat konsep-konsep menurut si pelaku sendiri; dimana peneliti hanya mengkonstruksikan realitas sosial sesuai dengan konsep-konsep dari si pelaku itu sendiri. Lihat Robert Gephart, *Paradigm and Research Methods*, (University of Alberta). Melalui pendekatan etik, peneliti berusaha memahami gerakan mahasiswa baik yang mendukung dan menentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Sedangkan melalui pendekatan emik, peneliti berusaha memahami faktor elit politik dalam mendukung gerakan mahasiswa yang menentang dan mendukung B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hal 165.

<sup>129</sup> *Ibid.*, hal 165.

<sup>130</sup> Buhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001, hal 118.

**Tabel 1.4:**  
**Daftar Narasumber Penelitian**

ERA PEMERINTAHAN	AKTOR GERAKAN MAHASISWA	AKTOR ELIT PARTAI POLITIK
<b>Pemerintahan B.J.Habibie</b>	<p><b>Pendukung</b> <b>HMI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anas Urbaningrum (Ketua Umum PB HMI)</li> <li>2. M. Fakhruddin (Ketua Umum PB HMI)</li> </ol> <p><b>KAMMI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fachri Hamzah (Pendiri KAMMI dan Ketua Umum KAMMI Pusat)</li> </ol> <p><b>Penentang</b> <b>FORKOT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eli Salomo (Mahasiswa ISTN)</li> <li>2. Adian Napitupulu (Mahasiswa UKI)</li> <li>3. Abdullah (Mahasiswa IKIP Jakarta)</li> <li>4. Syaficq (Mahasiswa STF Driyarkara)</li> </ol> <p><b>FKSMJ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarbini (Mahasiswa Untag, Jakarta)</li> </ol>	<p><b>Pendukung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahmad Sumargono (PBB)</li> <li>2. Eggy Sudjana (PPP)</li> <li>3. Letjend (Purn) Fachrul Rozi (Wakil Panglima TNI dan Kasum TNI)</li> </ol> <p><b>Penentang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sri Bintang Pamungkas (PUDI)</li> <li>2. Eros Djarot (PDIP)</li> </ol>
<b>Pemerintahan Abdurrahman Wahid</b>	<p><b>Pendukung</b> <b>BEMI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arif Rahman (Mahasiswa Untar, Jakarta)</li> <li>2. Quddus Salam (Mahasiswa IAIN Surabaya)</li> </ol> <p><b>Penentang</b> <b>BEMSI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Taufik Riyadi (Mahasiswa UI)</li> <li>2. Andre Rosiade (Mahasiswa Trisakti)</li> </ol>	<p><b>Pendukung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasyim Wahid (PDIP)</li> <li>2. Muhaimin Iskandar (PKB)</li> <li>3. Muhyidin Arabusman (PKB)</li> </ol> <p><b>Penentang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bachtiar Chamsjah (PPP)</li> <li>2. Akbar Tanjung (Golkar)</li> <li>3. Letjend (Purn) TNI Fachrul Rozi (Wakil Panglima TNI dan Kasum TNI)</li> <li>4. Letjen (Pur) TNI Agus Widjojo (Kaster TNI)</li> </ol>
<b>Pengamat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rahman Tolleng</li> </ol>	

Data yang diperoleh dengan metode kualitatif diolah menjadi data kualitatif. Data ini lalu dianalisis dan dideskripsikan dengan menggunakan teknik ‘analisis kualitatif’, yaitu sebuah analisis yang didasarkan pada interpretasi penulis. Semua data-data kualitatif yang dikumpulkan lalu diseleksi dan disederhanakan kemudian dianalisis untuk menemukan intisari, tema pokok, fokus masalah dan pola-polanya.<sup>131</sup> Analisis berangkat dari kerangka konsep yang bersifat umum untuk melihat kenyataan yang sesuai konteksnya. Teknik analisis kualitatif dipilih karena menurut Bogdan dan Taylor teknik ini menghasilkan data

<sup>131</sup> Yudith Goldstein dan Robert O. Keohane menekankan perlunya para peneliti yang mengkaji ide harus berusaha menafsirkan apa yang ada dalam benak orang. Lihat Yudith Goldstein dan Robert O. Keohane, “*The Ideas and Foreign Policy: An Analysis Framework*”, dalam Yudith Goldstein dan Robert O. Keohane, *Ideas and Foreign Policy: Beliefs Institutions and Political Change*, Ithaca-London: Cornell University Press, 1995, hal. 27.

kualitatif berupa deskriptif dari kata-kata tertulis dan lisan dari para pelaku yang diamati.<sup>132</sup>

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Penulisan hasil studi ini dituangkan ke dalam sejumlah bab. Adapun sistematika penulisan meliputi tujuh bab, yaitu:

#### **Bab 1 Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang, pokok masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **Bab 2 Sejarah Gerakan Mahasiswa Indonesia**

Bab 2 ini membahas gerakan mahasiswa di negara-negara lain dan gerakan mahasiswa di Indonesia. Gerakan mahasiswa di negara-negara lain yang dibahas yaitu gerakan mahasiswa di Prancis, Jerman dan Korea Selatan. Sedangkan gerakan mahasiswa Indonesia yang dibahas, yaitu gerakan mahasiswa pada masa Orde Lama dan gerakan mahasiswa pada masa Orde Baru yang dimulai dari pembahasan gerakan mahasiswa pada masa kolonial. Gerakan mahasiswa pada masa kolonial yang dibahas adalah gerakan mahasiswa Angkatan 1908 dan 1928. Gerakan mahasiswa yang dibahas pada masa Orde Lama adalah gerakan mahasiswa Angkatan 1966, sedangkan gerakan mahasiswa yang dibahas pada masa Orde Baru adalah Angkatan 1974, Angkatan 1977, Angkatan 1978, dan gerakan mahasiswa Angkatan 1998.

#### **Bab 3 Pro-Kontra Gerakan Mahasiswa pada Masa B.J. Habibie**

Bab ini membahas polarisasi gerakan mahasiswa dalam kejatuhan Presiden B.J. Habibie. Agar lebih fokus bab ini hanya membahas satu kelompok gerakan mahasiswa, yaitu: (1) HMI dan KAMMI yang merupakan kelompok gerakan mahasiswa pendukung B.J. Habibie; (2) Forum Kota (FORKOT) dan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) yang merupakan kelompok gerakan mahasiswa penentang B.J. Habibie. Setelah membahas organisasi dan kepemimpinan, ideologi organisasi dan gerakan, basis massa, isu yang diusung,

---

<sup>132</sup> Lihat Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Metode Kualitatif: Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993, hal. 27-30.

serta hubungan HMI, KAMMI, FORKOT dan FKSMJ dengan kelompok kepentingan dan partai politik, bab ini kemudian membahas konflik terlebih dahulu membahas konflik politik antara HMI bersama KAMMI melawan FORKOT bersama FKSMJ.

#### **Bab 4 Pro-Kontra Gerakan Mahasiswa pada Masa Abdurrahman Wahid**

Bab ini membahas polarisasi gerakan mahasiswa dalam kejatuhan Presiden Abdurrahman Wahid. Agar lebih fokus bab ini hanya membahas dua organisasi gerakan mahasiswa, yaitu: (1) Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia (BEMI), gerakan mahasiswa intra-universiter yang Mendukung Abdurrahman Wahid; (2) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI), gerakan mahasiswa intra-universiter yang Menentang Abdurrahman Wahid. Bab ini membahas kedua gerakan mahasiswa intra-universiter dari aspek organisasi dan kepemimpinan, ideologi organisasi dan gerakan, basis massanya dan hubungannya dengan kelompok-kelompok kepentingan dan partai politik, serta, kondisi politik pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid.

#### **Bab 5 Gerakan Mahasiswa dan Dukungan Elit Politik Masa B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid**

Bab ini 5 berisi pembahasan tiga hal pokok, yaitu: (1) strategi gerakan mahasiswa; (2) gerakan mahasiswa dan peran elit politik di dalamnya; (3) kepentingan elit politik dan respon gerakan mahasiswa. Selain itu bab ini membahas alasan gerakan mahasiswa dalam bekerjasama dengan elit-elit politik terutama elit partai politik. Dengan demikian bab ini berisi analisis tentang faktor peran dan kepentingan elit politik dalam mempertajam konflik gerakan mahasiswa dalam menentang dan mendukung B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid.

#### **Bab 6 Kepentingan dalam Gerakan Mahasiswa Masa B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid**

Bab 6 ini membahas kepentingan politik dan ideologi gerakan mahasiswa pada masa Pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Bab ini menganalisis perbedaan kepentingan dan ideologi dalam gerakan mahasiswa pada masa Pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Bab ini juga membahas kepentingan politik dan ideologi gerakan mahasiswa mempengaruhi polarisasi gerakan mahasiswa pada masa Pemerintahan B.J. Habibie dan

**Universitas Indonesia**

Abdurrahman Wahid. Selain itu, bab ini juga membahas tentang adanya perbedaan kepentingan dan ideologi itu mempengaruhi sikap dan pandangan Pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurahman Wahid.

### **Bab 7 Penutup**

Bab 7 ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan implikasi teoritik. Kesimpulan berisi tentang temuan-temuan penelitian yang mengacu pada pertanyaan pokok penelitian mengenai: (1) sebab-sebab terjadinya polarisasi gerakan mahasiswa pada masa Pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid; (2) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya polarisasi gerakan mahasiswa; (3) kepentingan politik dan ideologi dalam gerakan mahasiswa; (4) peran elit partai politik dalam gerakan mahasiswa; (5) pengaruh kepentingan politik dan ideologi elit partai politik dalam polarisasi gerakan mahasiswa. Sedangkan implikasi teoritik berisi tentang relevansi teori-teori yang digunakan dalam studi ini.